

LAPORAN  
**AKUNTABILITAS  
KINERJA  
2020**

---

DIREKTORAT PENGEMBANGAN  
METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI



**BADAN PUSAT STATISTIK**

# KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat selama Tahun 2020 kepada Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. LAKIN ini disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*. Laporan ini memberikan gambaran mengenai pencapaian misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei yang sejalan dengan visi BPS dan penyelenggaraan kegiatan sasaran strategis yaitu tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi BPS dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2020 dan memberikan rekomendasi pada tahun 2021.

Jakarta, 22 Februari 2021

Direktur  
Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei,



Sarpono

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	2
3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	2
4. Sumber Daya Manusia (SDM).....	4
5. Potensi dan Permasalahan.....	5
6. Sistematika Penyajian Laporan .....	6
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA .....	7
1. Rencana Strategis 2020-2024 .....	7
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 .....	9
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
1. Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	11
2. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	47
3. Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Renstra 2020-2024 .....	50
4. Prestasi.....	51
5. Kegiatan Prioritas 2020.....	53
6. Upaya Efisiensi .....	53
7. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	55
BAB 4. PENUTUP .....	57
1. Tinjauan Umum .....	57
2. Tindak Lanjut.....	57
LAMPIRAN .....	59

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.....	3
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020.....	9
Tabel 3.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2020 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.....	12
Tabel 3.2. Daftar Survei Bidang Sosial, Produksi, dan Distribusi Tahun 2020.....	14
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Turunan: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%).....	27
Tabel 3.4. Jumlah Master Wikerstat yang Dimutakhirkan pada Tahun 2020.....	28
Tabel 3.5. Jumlah Master Wikerstat SLS yang Dimutakhirkan pada Tahun 2020.....	29
Tabel 3.6. Jenis Pembinaan/Konsultasi/Kerja Sama pada Direktorat PMSS.....	34
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Terhadap Target Renstra 2019 dan 2020.....	48
Tabel 3.8. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 2020 Terhadap Target Renstra 2020-2024.....	50
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Menurut Program Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020.....	55

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komposisi SDM Direktorat Metodologi Sensus dan Survei Menurut Tingkat Pendidikan .....	4
--	---

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei .....	59
Lampiran 2. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	60
Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Sasaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020.....	62
Lampiran 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan (Kondisi Desember 2020)....	63
Lampiran 5. Mailing List Publikasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020.....	64

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (Perka BPS) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Perka BPS Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Tugas Direktorat PMSS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standarisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik. Misi Direktorat PMSS yaitu:

- a. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI), dan
- b. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Pelaksanaan misi tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Direktorat PMSS. Tujuan pertama adalah terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data yang berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan pertama adalah:

- a. Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas;
- b. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
- c. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data;
- d. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas.

Tujuan kedua adalah mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data. Sasaran strategis dari tujuan kedua ini adalah terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik).

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2020 Direktorat PMSS melaksanakan berbagai kegiatan yang mengacu pada Program Penyediaan

dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang terdiri dari beberapa kegiatan. Kode dan nama kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat PMSS adalah [2900]. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; [2905]. Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan [2897]. Sistem Pendukung Layanan untuk Diseminasi Data dan Informasi Statistik. Rata-rata capaian sasaran sebesar 131,24 %.

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar Rp 2.116.857.000,- , sementara realisasinya mencapai Rp 1.968.448.371,- (92,99%). Dalam pelaksanaan program Direktorat PMSS tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi.

Secara umum kendala tersebut disebabkan oleh:

- a. Tuntutan kualitas dan keragaman data dari pemerintah dan pemangku kepentingan kepada BPS menyebabkan peningkatan beban kerja Direktorat PMSS sangat tinggi, sehingga tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada.
- b. Peningkatan kapasitas SDM di bidang metodologi sensus dan survei belum dapat dilakukan secara rutin.
- c. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM).

Berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat PMSS untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, misalnya secara *online*, media elektronik (internet), forum diskusi atau pun perkumpulan statistisi, *knowledge sharing* antar-pegawai di dalam unit kerja, dll.
- b. Mengoptimalkan pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, kemampuan SDM, dan jumlah SDM.
- c. Melakukan penyesuaian pada desain metodologi survei dan mekanisme identifikasi daftar sampel agar survei pada masa pandemi dapat berjalan lebih optimal.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait baik eksternal maupun internal BPS.

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat PMSS, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat PMSS menunjukkan keberhasilan dengan rata-rata capaian sasaran yang lebih tinggi daripada tahun 2019, bahkan terdapat kegiatan yang melampaui target pencapaian kinerja. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 131,24%.



Tingkat pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat PMSS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi Direktorat PMSS.

## 1. Latar Belakang

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) merupakan unit kerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengemban tugas pemerintah untuk pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.

Sebagai perwujudan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada awal Tahun 2020, Direktorat PMSS menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS 2020. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut dipantau setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2020 merupakan perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Laporan ini pun akan digunakan sebagai umpan balik dalam memicu perbaikan kinerja Direktorat PMSS di tahun yang akan datang.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur Direktorat PMSS kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja, tujuan, dan sasaran Direktorat PMSS selama Tahun 2020.

## **3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

### **1. Kedudukan**

Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

### **2. Tugas**

Tugas Direktorat PMSS menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Bab IV Pasal 99 adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standarisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PMSS menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan desain sensus dan survei,
- b. Pelaksanaan pengembangan standarisasi dan klasifikasi statistik, dan pelaksanaan dan pengembangan *Statistical Business Register*
- c. Pelaksanaan pengembangan kerangka sampel, dan
- d. Pelaksanaan pengembangan pemetaan statistik.

#### 4. Susunan Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat PMSS terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan Desain Sensus dan Survei, terdiri dari 3 Seksi, yaitu Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Sosial, Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Produksi, dan Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.
- b. Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik, terdiri dari 2 Seksi, yaitu Seksi Pengembangan Standardisasi Statistik, dan Seksi Pengembangan Klasifikasi Statistik.
- c. Subdirektorat Pengembangan Kerangka Sampel, terdiri dari 3 Seksi, yaitu Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Sosial, Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Produksi, dan Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.
- d. Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik, terdiri dari 3 Seksi, yaitu Seksi Pengembangan Peta Wilayah, Seksi Pengembangan Muatan Peta Wilayah, dan Seksi Pengembangan Peta Statistik Wilayah Kecil.

Secara rinci bagan organisasi Direktorat PMSS terdapat pada Lampiran 1.

#### 5. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Direktorat PMSS yang menjadi tolok ukur keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Utama yang menjadi implementasi sasaran Direktorat PMSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei**

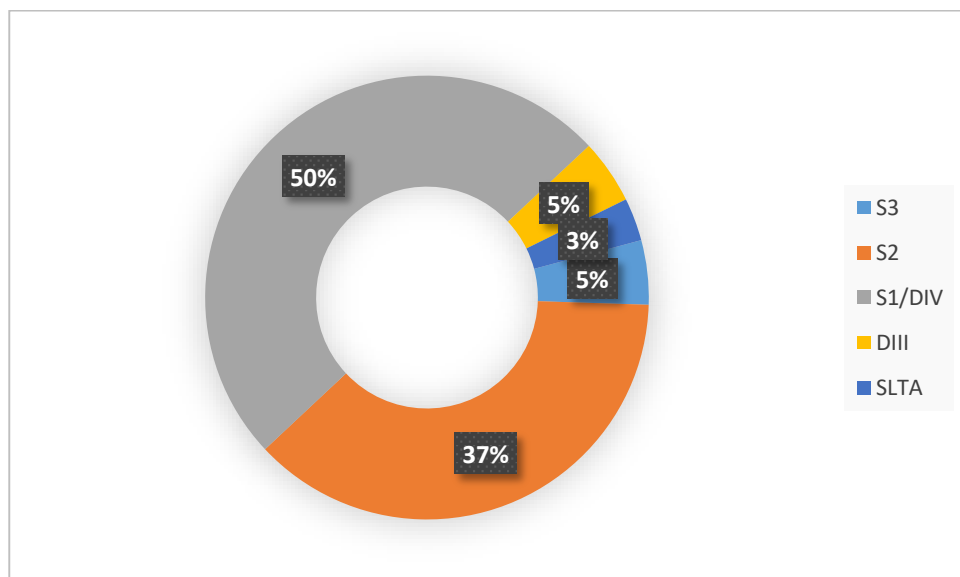
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan	Jelas

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
	rujukan bagi produsen data	Metodologi Sensus dan Survei	
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik)	Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas

#### 4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada akhir Tahun 2020, SDM Direktorat PMSS seluruhnya berjumlah 64 pegawai. Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/S1, yaitu mencapai 50 persen. SDM dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 mencapai 42 persen. Hal tersebut mencerminkan kualitas SDM Direktorat PMSS cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah.

**Gambar 1.1. Komposisi SDM Direktorat Metodologi Sensus dan Survei Menurut Tingkat Pendidikan**



## 5. Potensi dan Permasalahan

Dalam perjalanannya mengemban tugas sesuai amanat Perka BPS Nomor 7 Tahun 2008 dan mengacu uraian tugas yang tercantum dalam Perka BPS Nomor 1 Tahun 2009, Direktorat PMSS berupaya memenuhi kebutuhan kegiatan statistik kependudukan, pertanian, dan bidang ekonomi. Khusus kegiatan statistik bidang ekonomi telah dilakukan pengembangan kerangka sampel melalui pembangunan *Statistical Business Register*. Namun demikian, Direktorat PMSS terus melakukan pengembangan desain sensus dan survei, klasifikasi dan standarisasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik. Direktorat PMSS harus dapat memberi wawasan dan melakukan pembinaan terkait metodologi sensus dan survei yang mencakup semua aspek. Selain itu, tugas yang tak kalah penting dan menjadi amanat Direktorat PMSS dan BPS secara keseluruhan adalah pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi survei serta sebagai pembina standar data dalam implementasi Satu Data Indonesia.

Dalam mendukung tugas Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik khususnya terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi, Direktorat PMSS mengembangkan penyelenggaraan statistik agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna data statistik yang akurat dan semakin beragam. Peran Direktorat PMSS dalam implementasi Satu Data Indonesia menjadi sangat penting. Satu Data Indonesia membutuhkan standarisasi dalam bentuk petunjuk teknis yang baku terkait penyelenggaraan kegiatan statistik baik dalam hal konsep, definisi, metode penyusunan kerangka sampel, dan penarikan sampel. Berkembangnya teknologi informasi berbasis geospasial juga membuka potensi yang besar dalam pengembangan metodologi survei. Penggunaan data penginderaan jarak jauh mulai dijajaki terutama untuk merancang survei bidang pertanian yang berbasis area.

Pengembangan di bidang metodologi tersebut tidak luput dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi, baik yang berakibat pada kegiatan teknis maupun administrasi. Secara umum permasalahan tersebut antara lain:

- a. Tuntutan kualitas dan keragaman data dari pemerintah dan pemangku kepentingan kepada BPS menyebabkan peningkatan beban kerja Direktorat PMSS sangat tinggi sehingga tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada.
- b. Dukungan infrastruktur untuk mengolah data geospasial masih belum optimal, masih kurangnya sarana penyimpanan dan workstation yang dapat mengolah data citra beresolusi tinggi.

- c. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM).

## **6. Sistematika Penyajian Laporan**

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2020 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia; potensi dan permasalahan yang dihadapi Direktorat PMSS; serta sistematika penyajian laporan.
- BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PMSS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS Tahun 2020.
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi analisis pencapaian kinerja tahun 2020; perkembangan capaian kinerja tahun 2020 terhadap capaian kinerja tahun 2019; capaian kinerja tahun 2020 terhadap target renstra 2020-2024; prestasi; kegiatan prioritas 2020; upaya efisiensi; dan realisasi anggaran tahun 2020.
- BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

# BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

# 2

## 1. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 yang sudah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2020-2024.

### 1. Misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Misi yang ditetapkan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI), dan
- b. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

### 2. Tujuan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Tujuan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, seperti yang tercantum pada Renstra Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2020-2024, adalah:

Tujuan 1: Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas.

Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data.

### 3. Sasaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Sasaran strategis Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam mendukung Sistem Statistik Nasional yang memenuhi standar internasional dan mewujudkan Satu Data Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:



- a. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas” adalah:
  1. Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas;
  2. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
  3. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data;
  4. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas.
- b. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data”, adalah terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik).

#### **4. Kebijakan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei**

Arah kebijakan penyelenggaraan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei diturunkan mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi, misi, dan tugas fungsi Kedeputusan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Fokus arah kebijakan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020-2024 yang selaras dengan arah kebijakan Kedeputusan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terkait layanan metodologi sensus dan survei, sebagai berikut:

- a. Penyediaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk mewujudkan data statistik berkualitas;
- b. Peningkatan penggunaan standar data dan klasifikasi statistik serta kode referensi di Indonesia;
- c. Penyediaan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
- d. Penyediaan peta wilayah kerja statistik yang akurat;
- e. Penyediaan publikasi *Metropolitan Statistical Area (MSA)*; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik).

## 5. Program Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Untuk dapat mencapai misi yang telah ditetapkan, program kerja kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020 terdapat pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), yang terdiri dari beberapa kegiatan. Kode dan nama kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei adalah [2900] Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; [2905] Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; [2897] Sistem Pendukung Layanan untuk Diseminasi Data dan Informasi Statistik.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dan Program Sistem Pendukung Layanan untuk Diseminasi Data dan Informasi Statistik bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Dalam rangka penyediaan data dan informasi statistik berkualitas, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Tugas utama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei adalah mengembangkan metodologi penyelenggaraan statistik sesuai dengan ragam statistik yang diperlukan.

## 2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Pada periode 2020, telah ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai unit kerja BPS. Pada tabel di bawah ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS.

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tujuan 1. Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas			
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Persen	100

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Dokumen	47
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi	5
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)	Persen	100
<p>Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data.</p>			
Terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei (baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik)	Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Pembinaan/ Kerjasama	75

**Kegiatan**

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

**Anggaran**

Rp 2.845.739.000,-

## BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

# 3

Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei merupakan perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan mau pun kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PMSS selama satu tahun anggaran 2020 melalui program-program kegiatan diuraikan pada bab ini.

### 1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja 2020 merupakan pencapaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian tersebut diukur melalui indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2020. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja 2020 yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Secara umum, kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 131,24% selama tahun 2020. Seperti disajikan pada Tabel 3.1, target yang ditetapkan pada semua sasaran strategis dapat tercapai, bahkan pada beberapa sasaran strategis pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan tingkat capaian untuk semua sasaran strategis yang mencapai 100% atau lebih.

Tingkat capaian tertinggi adalah pada sasaran strategis terwujudnya pembinaan dan/atau kerjasama dalam bidang metodologi sensus dan survei dengan tingkat capaian sebesar 210,67%. Dari 75 jumlah pembinaan/kerjasama yang ditargetkan pada tahun 2020, realisasinya sebanyak 158 kegiatan. Selain itu, pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran juga melampaui target yaitu sebanyak 59 dokumen dari 47 dokumen yang ditargetkan pada awal tahun 2020. Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data sebanyak 6 publikasi/laporan dari target sebanyak 5 laporan.

**Tabel 3.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2020**

**Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas					
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Persen	100	100	100 %
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Dokumen	47	59	125,53 %
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikas/ Laporan	5	6	120,00%
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)	Persen	100	100	100 %
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data					
Terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei (baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik)	Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Kegiatan	75	158	210.67%

Dengan demikian, selama kurun waktu satu tahun, sasaran strategis telah berhasil dilaksanakan dengan pencapaian yang baik. Meskipun demikian, di setiap sasaran masih ada

beberapa kendala yang dihadapi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, diperlukan strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi. Berikut ini diuraikan permasalahan yang ditemui dan strategi untuk mengatasi masalah pada setiap indikator.

**Indikator Kinerja 1: Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)**

Pencapaian Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam capaian indikator jumlah dokumen desain sampling sensus dan survei yang mutakhir tidak terlepas dari indikator lain yang saling terkait. Dalam periode 2020, Direktorat PMSS telah menghasilkan 47 dokumen desain sampling sensus dan survei sesuai dengan target. Perencanaan target sebanyak 47 dokumen didasarkan pada informasi awal dari unit kerja yang menangani program kegiatan BPS. Dokumen desain sensus dan survei merupakan naskah desain survei yang disiapkan untuk masing-masing survei bidang statistik sosial, bidang statistik produksi, serta bidang statistik distribusi dan jasa. Isi dalam dokumen desain ini mencakup antara lain jumlah sampel, metode dan prosedur pengambilan sampel, prosedur penghitungan penimbang (*sampling weight*), prosedur penghitungan kesalahan sampling (*sampling error*), dan prosedur pengumpulan data.

Namun dalam perjalanannya, pada pertengahan tahun ada tambahan permintaan rancangan survei yang berasal dari lembaga lain. Kegiatan ini dibiayai dengan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai Pembina statistik sektoral yang menangani bidang metodologi sensus dan survei, tentu hal ini menjadi kewajiban Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.

Permasalahan yang terjadi adalah:

1. Adanya adendum/perubahan ruang lingkup kerja sama tetapi tidak dilakukan revisi anggaran sehingga penggunaan anggaran tidak dapat dioptimalkan karena sebagian anggaran harus dikembalikan ke negara.
2. Kurang optimalnya penyerapan anggaran yang diakibatkan adanya peraturan tentang batas maksimum penerimaan honor kelompok kerja (pokja) dan jumlah hari kerja yang digunakan untuk kegiatan berbayar (yang dapat di-SPJ-kan).
3. Perjanjian Kerjasama yang disiapkan pada akhir tahun mengakibatkan penyelesaian pekerjaan memerlukan waktu lebih di luar jam kantor karena waktu dan sumber daya tidak sesuai dengan beban dan jumlah hari kerja yang diperlukan.
4. Terbatasnya sarana (laptop, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia), dan waktu yang diperlukan untuk pengembangan desain survei.

5. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja.
6. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral, serta kurangnya kesadaran unit kerja terkait lainnya dalam mendukung kelancaran pembinaan sesuai peraturan yang berlaku.

Strategi untuk mengatasi masalah:

1. Adanya keterbatasan sarana memaksa pegawai menggunakan laptop pribadi untuk pengayaan di bidang desain sensus dan survei.
2. Pengayaan dan peningkatan kapasitas SDM dilakukan secara *learning by doing* dan juga di luar jam kerja.
3. Pengaturan pembagian tugas kepada SDM disesuaikan dengan beban dan kemampuannya SDM, serta tenggat waktu yang ditentukan.
4. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk meningkatkan pemahaman mekanisme permintaan layanan di bidang metodologi survei bagi penyelenggara kegiatan statistik (termasuk bagi *subject matter* di BPS).

### **Indikator Kinerja 2: Jumlah dokumen pengembangan kerangka sampel survei**

Tahun 2020, penyusunan dokumen kerangka sampel survei yang mutakhir diperoleh sebanyak 59 dokumen atau terealisasi menjadi 125,53 persen dibandingkan target yang direncanakan sebanyak 47 dokumen. Penyusunan dokumen tersebut meliputi penyusunan kerangka sampel survei bidang statistik Sosial, bidang statistik Produksi, dan bidang statistik Distribusi dan Jasa.

**Tabel 3.2. Daftar Survei Bidang Sosial, Produksi, dan Distribusi Tahun 2020**

Sosial	Produksi	Distribusi
1. Survei Angkatan Kerja Nasional Panel 2020	1. Survei Ubinan Palawija	1. Survei Pola distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas (Poldis)
2. Survei Sosial Ekonomi Nasional & SSGI	2. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Maret-April 2020	2. Survei Perdagangan Antar Wilayah
3. Survei Konsumsi Makanan Indonesia	3. SUB-KSA Covid SR2 2020	3. Survei Perdagangan Uji Coba PDN
4. Survei Natrium Indonesia	4. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Mei-Juni 2020	4. Terintegrasi
5. Survei Perilaku Anti Korupsi	5. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Juli-Agustus 2020	5. Updating Direktori 47
6. Pendataan Podes 2020	6. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan September-Oktober 2020	6. Updating Pasar 2020
7. Pendataan Keluarga 2020		7. Survei Triwulan Kegiatan Usaha 2020
8. Survei Kepuasan Masyarakat BPOM		8. Survei E-Commerce
9. Global Adult Tobacco Survei 2020		

10. Sampel PES SP2020	7. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan November-Desember 2020	9. Business Character Survei
11. Survei Angkatan Kerja Nasional Panel + Komplemen	8. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Januari-Februari 2021	10. Survei Profil Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12. Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul	9. Survei Hortikultura Potensi (SHOPI2020)	11. Survei Wisatawan Nusantara
13. Sensus Penduduk - pembentukan subsels	10. Survei Komoditas Strategis Perkebunan (KOMSTRAT2020)	12. Survei Restoran (UMK)
14. Survei Konsumsi Air Minum	11. Survei IMK Tahunan	13. Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga
15. Survei Status Gizi Balita Indonesia	12. Survei IMK Triwulanan	14. Survei Tarif Sewa/Kontrak Rumah, Pembantu Rumah Tangga dan Baby Sitter
16. Updating Wilkerstat- SLS Rakorcam	13. Survei Konstruksi Tahunan dan Triwulanan (SKTH dan SKTR)	15. Survei Triwulan Kegiatan Usaha 2019
17. Updating Wilkerstat – SLS Lapangan SP September	14. Survei Konstruksi Perorangan (SKP)	16. Survei Pelaku Usaha Dampak Covid19
18. MFDonline Semester 1	15. Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI)	
19. MFDOnline Semester 2	16. Uji Coba Pembangunan Frame Jagung	
20. Pembentukan BS2020	17. Survei KSA secara Mandiri oleh BPS	
21. Assesment Dampak Cofid-19 terhadap rumah tangga di Indonesia.	18. Survei Rumput Laut	
22. Survei Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 terhadap Perempuan (BAPPENAS-MAMPU)	19. Pembangunan FRS dengan konsultan	
23. Survei Sero Covid19 Bali	20. Pembangunan FRS Mandiri	

Kegiatan penyusunan kerangka sampel sudah dilakukan tepat waktu meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Terjadi perubahan proses bisnis pada pendataan lapangan akibat pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada:
  - dilakukannya penyusunan ulang kerangka sampel dan penarikan sampel beberapa survei,
  - pembatalan atau penundaan pelaksanaan lapangan survei tahun 2020 meskipun seluruh dokumen persiapan survei telah selesai dibuat.
2. Infrastruktur TI belum memadai untuk mengelola survei berbasis geospasial.
3. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan.
4. Penarikan sampel tahap kedua yaitu pemilihan sampel rumah tangga tidak dapat difasilitasi menggunakan aplikasi CAPI.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Melakukan penyesuaian pada desain metodologi survei dan mekanisme identifikasi daftar sampel agar survei pada masa pandemi dapat berjalan lebih optimal. Penyesuaian yang dilakukan antara lain:
  - melakukan identifikasi awal untuk mengetahui kondisi zona pandemi di wilayah sampel



- melakukan perubahan prosedur updating rumah tangga dengan menyediakan beberapa alternatif metode seperti door to door dan snowball sesuai zona pandemi. Untuk wilayah zona merah, metode snowball dilakukan dengan identifikasi rumah tangga melalui nara sumber.
2. Berkoordinasi dengan Direktorat SIS melalui aplikasi halosis untuk melaporkan kendala terkait infrastruktur dan membangun aplikasi berbasis web untuk mengelola kerangka sampel berbasis geospasial.
  3. Memberdayakan SDM yang ada dengan menambah jam kerja.
  4. Melakukan kolaborasi dengan Direktorat SIS untuk melakukan Joint Developmet membangun sistem penarikan sampel secara otomatis di dashboard web monitoring sehingga penarikan sampel bisa dilakukan real time.

**Indikator Kinerja 3: Jumlah publikasi standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data**

Pada tahun 2020 Subdirektorat Sandardisasi dan klasifikasi statistik, Direktorat PMSS telah mampu menghasilkan 6 output laporan/aktivitas/Perban/Perka meliputi 3 (tiga) buah peraturan Badan Pusat Statistik/ peraturan Kepala Badan Pusat Statistik serta 3 (tiga) buah laporan (Laporan Penterjemahan COICOP, Laporan *Statistical Business Register*, Laporan Konsultasi Klasifikasi) , sehingga capaian kinerja melebihi target semula menjadi 120%. Adapun rincian capaian output tersebut adalah :

**1. Laporan Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia Tahun 2020 (Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Desa Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia Tahun 2020)**

Dalam rangka kegiatan Sensus Penduduk (SP) 2020 dan updating atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2010. Untuk memastikan konsistensi, updating dan validitas data wilayah administrasi terkecil sesuai dengan kondisi terkini, maka diperlukan updating terhadap metode penghitungan klasifikasi desa perkotaan yang digunakan pada tahun 2010 sekaligus melakukan update terhadap status klasifikasi desa perkotaan perdesaan berdasarkan data tahun 2020 . Sehingga pada tahun 2020 metode penghitungan klasifikasi desa perkotaan perdesaan mengalami sedikit perubahan yaitu tidak dimasukkan lagi variabel bioskop, perubahan kriteria pada persentase keluarga pengguna telepon kabel dan keluarga pengguna listrik, serta berubahnya batas titik potong skor total dalam menentukan pembeda status desa perkotaan dan desa perdesaan.

Selama 2020, kegiatan klasifikasi desa perkotaan perdesaan dilakukan dengan beberapa tahapan. Sebagai tahap awal adalah menggunakan data dasar potensi desa (PODES) 2019 update, untuk luas wilayah desa menggunakan data hasil pemetaan 2019, dan untuk jumlah penduduk menggunakan data jumlah penduduk kabupaten/kota hasil proyeksi penduduk per September 2019, dimana untuk mendapatkan hasil jumlah penduduk per desa dilakukan dengan menggunakan metode proporsi penduduk dari data penduduk hasil SP 2010 sehingga jumlah secara total penduduk kabupaten/kota sama dengan jumlah hasil proyeksi penduduk September 2019.

Tahap selanjutnya setelah dilakukan penghitungan dengan metode penghitungan klasifikasi desa perkotaan perdesaan yang terbaru, dengan tetap mempertahankan hasil verifikasi dan masukan dari daerah yang dilakukan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2019 sebelumnya; didapatkan hasil jumlah desa perkotaan pada tahapan ini adalah sebanyak 35.55 % desa berstatus desa perkotaan dan 64.45 % bestatus desa perdesaan. Terjadi peningkatan sebanyak 15.08 % desa perkotaan bila dibandingkan dengan kondisi status desa perkotaan pada tahun 2010 yang hanya sebanyak 20.47 % desa perkotaan.

Dari hasil yang didapat tersebut selanjutnya dilakukan konfirmasi pengecekan terhadap dampak penggunaan pada data kemiskinan, membandingkan dengan hasil jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan yang dihitung berdasarkan proyeksi penduduk yang dilakukan demografi dan kependudukan serta melakukan pengecekan terhadap korelasi Indeks Kesulitan Geografis (IKG) 2019. Dari konfirmasi dan pengecekan tersebut maka dilakukan sedikit perubahan dalam hal sumber penggunaan jumlah penduduk untuk penghitungan klasifikasi desa perkotaan perdesaan 2020 yaitu untuk menggunakan jumlah penduduk sementara hasil SP2020.

Berdasarkan penghitungan ulang dengan jumlah penduduk bersumber dari data sementara hasil SP2020 didapatkan bahwa status desa perkotaan 35.31 % dan status desa perdesaan 66.70 %, dengan peningkatan paling besar terjadi pada provinsi-provinsi yang berada di pulau jawa yaitu terjadi peningkatan dari 36.66% status desa perkotaan pada 2010 menjadi 65.15% status desa perkotaan pada tahun 2020. Hasil status klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan serta perubahan metode skoringnya tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Desa Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia Tahun 2020.

## **2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dan Master File Standar Data Statistik Tahun 2020**

Pada tahun 2019 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; yaitu kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Dalam Peraturan Presiden tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik mempunyai tugas sebagai pembina data statistik yang salah satunya adalah menetapkan Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau Instansi Daerah. Salah satu tugas yang diberikan pada fungsi pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik adalah membuat petunjuk teknis mengenai standar data statistik dan penetapan standar data statistik versi awal yaitu master file standar data statistik tahun 2020.

Dalam rangka menyusun petunjuk teknis standar data statistik dan master file standar data statistik versi awal dilakukan beberapa hal yaitu:

- a. Uji coba terhadap beberapa Instansi Pusat yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Instrumen yang diujicobakan selain konten dari standar data statistik itu sendiri (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan) juga ujicoba alur usulan baru dan pemutakhiran dari standar data statistik, serta meminta masukan dari KL terhadap petunjuk teknis standar data statistik yang disusun.
- b. Terkait penyusunan master file data statistik versi awal dilakukan inventarisasi standar data yang berasal indikator-indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi 1/Versi 1 dan Indikator Sensus Penduduk.
- c. Melakukan inventarisasi masukan terkait standar data pada poin b pada beberapa subjek meter utamanya dari kedeputian sosial.
- d. Melakukan inventarisasi masukan terhadap penyusunan dan tata kelola pada petunjuk teknis standar data kepada pimpinan Kepala BPS Provinsi Seluruh Indonesia sekaligus melakukan sosialisasi Satu Data Indonesia.

Secara umum petunjuk teknis standar data statistik memuat tata kelola dan alur pengajuan standar data baru, pengajuan standar data pemutakhiran, peran produsen data

dan wali data baik di tingkat pusat maupun daerah, peran dan kewajiban pembina data statistik di pusat maupun daerah, juga alur penetapan standar data statistik. Petunjuk teknis tersebut tertuang pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik. Sedangkan penyusunan master file standar data statistik telah disusun sebanyak 2243 standar data versi awal yang sebagian besar bersumber dari Indikator SDGs Edisi 1 dan Indikator Sensus Penduduk.

### **3. Publikasi Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) 2020 (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)**

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan salah satu klasifikasi baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk aktivitas ekonomi. Pada awalnya KBLI dirancang untuk keperluan analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dengan semakin strategisnya peranan dan penggunaan KBLI, klasifikasi ini juga digunakan untuk penentuan bidang usaha yang tercantum pada Online Single Submission (OSS) yaitu sistem yang digunakan untuk mempermudah perizinan usaha secara daring. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang dijadikan dasar penggunaan KBLI 2020 dalam bentuk Peraturan BPS. Dengan adanya Peraturan BPS tersebut maka pengklasifikasian aktivitas ekonomi menurut kelompok lapangan usaha yang ada di Indonesia diwajibkan merujuk pada kode KBLI 2020.

KBLI 2020 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2015 Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017 (Perka 2017), sehingga KBLI 2020 masih tetap mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 4 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2008 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2020 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. KBLI 2020 diterbitkan dalam bentuk Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 2 tentang KBLI Tahun 2020, secara bertahap KBLI 2015, KBLI 2009 dan KBLI versi sebelumnya, harus ditinggalkan dan tidak berlaku lagi. KBLI 2020 juga disusun untuk menunjang perubahan bidang usaha serta perizinan.

Proses penyusunan KBLI 2020 dimulai sejak diadakannya sosialisasi KBLI 2015 pada tanggal 2 Mei 2019. Sosialisasi tersebut dihadiri K/L dengan agenda selanjutnya adalah penyampaian usulan perbaikan oleh K/L kepada BPS. Durasi penyampaian usulan perbaikan tersebut dibuka cukup panjang, yakni sampai tgl 30 Juni 2020. Kemudian dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam bentuk rapat pembahasan KBLI yang diadakan

berdasarkan kategori. Rapat pembahasan tersebut dimulai sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 dengan melibatkan 24 K/L yang berperan aktif menyampaikan usulan perbaikan kode KBLI, dengan total usulan sebanyak 1.870 kode.

Pada perencanaan awal, pembahasan akan dilakukan melalui diskusi secara tatap muka langsung. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, maka perlu dibuat penyesuaian sehingga diputuskan untuk mengadakan diskusi secara daring. Dari total diskusi yang dilakukan sebanyak 44 pertemuan, 35 pertemuannya dilakukan secara daring, sedangkan sisanya adalah pertemuan secara tatap muka yang dilakukan sebelum adanya pandemi. Penerbitan KBLI 2020 ditandai dengan launching Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 dan aplikasi Sibaku secara daring melalui zoom dan youtube pada rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), adalah salah satu dari beberapa klasifikasi yang diterbitkan oleh BPS yang dalam perkembangannya juga harus dimutakhirkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, maka kebijakan dan kegiatan yang mengacu pada KBLI 2015 dapat mengganti acuannya pada KBLI 2020. Namun dalam pergantian penggunaan KBLI 2015 dengan KBLI 2020, tidak cukup hanya dengan mengandalkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, karena keterbatasan cakupan yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Sehingga publikasi ini disusun sebagai panduan yang melengkapi peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 sehingga lebih mudah dalam memahami dan mengimplementasikan KBLI 2020.

Penyusunan Publikasi KBLI 2020 merupakan penyempurnaan Publikasi KBLI 2015, sehingga terjadinya perubahan dan pergeseran struktur dan judul nomenklatur KBLI 2020 tidak mengubah tatacara dan makna klasifikasi. Klasifikasi KBLI 2020 terdiri dari struktur pengklasifikasian aktivitas ekonomi yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tatacara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Struktur klasifikasi menunjukkan format standar untuk mengelola informasi rinci tentang keadaan ekonomi, sesuai prinsip-prinsip dan persepsi ekonomi.

Secara umum, baik KBLI 2020 dan KBLI 2015 masih mengacu pada rujukan yang sama yaitu ISIC Rev. 4 yang terdiri dari 21 kategori. Perubahan struktur berupa pergeseran atau pengelompokan suatu kegiatan dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya, dan penambahan klasifikasi baru yang disebabkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi, memungkinkan untuk terbentuknya kelompok yang berdiri sendiri atau digabungkan

dengan kategori lain yang lebih sesuai. Di dalam publikasi ini lah akan dituangkan informasi-informasi terkait:

- Prinsip Dasar KBLI, yaitu sifat dan tujuan klasifikasi, Cakupan Klasifikasi, Prinsip dalam pengklasifikasian, struktur dan sistem pengkodean.
- Penerapan KBLI, yaitu terkait aktivitas utama, aktivitas sekunder, aktivitas penunjang, definisi aktivitas dalam KBLI, penjelasan terkait unit statistik, serta penetapan KBLI bagi unit statistik.
- Perubahan KBLI, yaitu Perubahan ISIC Rev. 4 menjadi KBLI 2020, Perubahan KBLI 2015 Perka No. 19 tahun 2017 menjadi KBLI 2020 Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020.

Dengan adanya publikasi KBLI 2020 ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan dan mengimplementasikan KBLI 2020. Baik dalam penggunaannya untuk kegiatan statistik maupun dalam kebijakan selain kegiatan statistik.

#### **4. Laporan Penerjemahan COICOP 2018**

Klasifikasi baku pengeluaran konsumsi rumah tangga menurut tujuan (*the Classification of Individual Consumption According to Purpose/COICOP*) adalah referensi klasifikasi pengeluaran rumah tangga internasional. Tujuan dari COICOP adalah untuk menyediakan kerangka kerja kategori homogen barang dan jasa, yang dianggap sebagai fungsi atau tujuan pengeluaran konsumsi rumah tangga. COICOP merupakan bagian kesatuan dari Sistem Neraca Nasional (SNA), tetapi juga digunakan di beberapa area statistik lainnya, seperti statistik pengeluaran rumah tangga berdasarkan survei anggaran rumah tangga dan analisis standar hidup; indeks harga konsumen; perbandingan internasional dari produk domestik bruto (PDB) dan komponen pengeluarannya melalui paritas daya beli; dan statistik yang berkaitan dengan budaya, olahraga, makanan, kesehatan, dan pariwisata.

COICOP 2018 mengakomodir kebutuhan pengguna agar lebih detail, dan membahas beberapa isu lain yang diperlukan dalam revisi klasifikasi. COICOP 2018 mencerminkan perubahan signifikan dalam barang dan jasa, menguatkan hubungan COICOP dengan klasifikasi lain, dan menangani kebutuhan statistik dan kebijakan yang muncul dari beberapa organisasi internasional.

Pada bulan Maret 2018, Sidang Komisi Statistik PBB ke-49 mengesahkan COICOP 2018 sebagai standar yang diterima secara internasional. Pada Tahun 2020 Badan Pusat Statistik dalam hal ini Fungsi Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik mulai melakukan penerjemahan COICOP 2018 ini. COICOP dalam versi Indonesia ini dinamakan Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Indonesia (KBPRTI) 2020.

## 5. Laporan *Statistical Business Register (SBR) 2020*

Pada tahun 2013, BPS mulai membangun SBR dengan nama *Integrated Business Register (IBR)* yang bertujuan untuk mengintegrasikan data direktori seluruh *subject matter* secara terpusat ke dalam satu sistem. SBR ditetapkan sebagai salah satu prinsip dasar transformasi statistik dan peningkatan kualitas melalui program STATCAP-CERDAS dan Reformasi Birokrasi BPS. SBR dibangun dengan konsep dan definisi unit statistik yang baku mengikuti *System of National Account (SNA) 2008*. SBR merupakan basis data unit ekonomi yang terintegrasi, mutakhir, dan komprehensif yang dipelihara oleh institusi statistik untuk tujuan statistik. SBR berfungsi menyediakan populasi unit statistik ekonomi sebagai kerangka induk untuk survei-survei ekonomi, sehingga SBR dapat dijadikan sebagai alat koordinasi cakupan sensus/survei dan integrasi data. Pemeliharaan data SBR dilakukan melalui *survey feedback*, *quality improvement survey*, *profiling*, dan sumber data administratif.

Bertransisi dari sistem pemutakhiran direktori perusahaan/usaha yang masih dikelola oleh masing-masing *subject matter* produsen data, proses updating data SBR belum memiliki proses bisnis yang terintegrasi. Oleh karena itu, kegiatan SBR pada tahun 2020 berfokus kepada penyiapan statistik ekonomi terintegrasi, di samping pemeliharaan data dan pelayanan kebutuhan kerangka induk survei berbasis perusahaan/usaha.

**Pertama**, SBR melakukan kegiatan penyusunan standar data variabel statistik ekonomi berbasis perusahaan. Selaras dengan penyusunan standar data dalam kerangka Satu Data Indonesia, kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar statistik ekonomi hulu-hilir, menyamakan interpretasi konsep definisi, koherensi, konsistensi, dan keterbandingan data ekonomi mengacu referensi internasional, serta memudahkan integrasi data hasil survei untuk pemutakhiran SBR. Output dari kegiatan ini adalah draft standar data variabel SBR yang akan masuk dalam Master File Standar Data Statistik (MFSDS) versi 2 pada tahun 2021.

**Kedua**, SBR melakukan kegiatan perancangan Petunjuk Teknis Penyiapan Statistik Ekonomi Terintegrasi melibatkan tim terintegrasi lintas unit kerja dari kedeputan MIS, *subject matter*, dan neraca. Penyusunan petunjuk teknis ini penting untuk mendefinisikan proses bisnis baru yang terintegrasi dan memastikan aliran data dari sumber data hasil survei internal BPS dan data administratif Kementerian/Lembaga untuk pemutakhiran SBR berjalan dengan baik. Dengan demikian, SBR dapat menyediakan kerangka induk (*master frame*) survei berbasis perusahaan/usaha yang komprehensif dan *up-to-date* sesuai harapan

pengguna. Output dari kegiatan ini adalah draft petunjuk teknis penyiapan statistik ekonomi terintegrasi yang akan ditetapkan sebagai Peraturan Kepala BPS pada tahun 2021.

**Ketiga**, SBR membangun diskusi kolaboratif dengan Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan LKPP untuk menginisiasi kerjasama perolehan data administratif. Dengan Kementerian Keuangan, pada tahun 2019 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pertukaran data BPS dan Kementerian Keuangan termasuk di dalamnya data wajib pajak/ data Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meng-*update* SBR. Data wajib pajak telah mengalir ke SBR namun karena *volume*-nya yang cukup besar dalam prosesnya masih mengalami kendala dari sisi sistem dan kelengkapan data sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk mengupdate SBR dan dilakukan diskusi evaluasi dengan penyedia data. Dengan BKPM, SBR menginisiasi kerjasama untuk perpanjangan MoU antara BPS dan BKPM serta PKS untuk perolehan data registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) pada *Online Single Submission (OSS)* dan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk mengupdate SBR. Sedangkan dengan LKPP, diskusi untuk inisiasi kerjasama pemanfaatan KBLI dan perolehan data perusahaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah untuk SBR telah dilakukan dengan didukung tim Biro Hukum dan Kerjasama untuk *drafting* Nota Kesepahaman/MoU dan PKS.

**Keempat**, SBR melakukan pengembangan sistem secara mandiri/*inhouse* sebagai salah satu modul dari *Frame Register System (FRS)* melanjutkan pengembangan sistem oleh pihak ketiga (sistem lelang) pada tahun 2019 (lebih detailnya lihat pada bagian Sistem Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei).

**Kelima**, SBR melakukan pengintegrasian/ pemutakhiran basis data hasil kegiatan Updating Direktori SBR 2019, Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) 2019, dan kegiatan Statistik Pariwisata 2019. Kegiatan pemutakhiran basis data dari hasil Updating Direktori SBR 2019 merupakan kelanjutan kegiatan pemutakhiran yang baru dilakukan pada tahap *matching* awal dengan program otomasi. Pada tahun 2020, proses *matching* dilanjutkan dengan penilaian petugas dari hasil program otomasi di 2019 untuk memastikan kualitas data integrasi. Sebanyak 215.710 usaha/perusahaan SBR diupdate menggunakan *feedback* survei pariwisata. Dari jumlah tersebut 213.477 (98,96%) aktif, 307 (0,14%) tutup, dan 1.926 (pindah). Dari hasil integrasi dengan usaha DPP (Direktori Perusahaan Pertanian terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan) ditambahkan usaha sebanyak 6.610 usaha/perusahaan berlokasi di sekitar ibu kota provinsi. Secara total, output dari



kegiatan ini adalah persentase data SBR yang ter-*update* pada tahun 2020 sebanyak 100,00% dari target.

**Keenam**, SBR memberikan pelayanan permintaan data dari beberapa unit kerja internal untuk keperluan penyiapan kerangka survei di antaranya Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri (PDN) dan Neraca Jasa. Di samping keenam kegiatan tersebut, SBR berpartisipasi aktif dalam pembahasan indikator ekonomi digital di tingkat internasional sebagai delegasi BPS dalam Digitalization dan Globalization Task team pada *UN Committee Expert on Business and Trade Statistics*. SBR juga ikut serta dalam diskusi pembahasan draft Peraturan BPS terkait pengumpulan data pelaku usaha Perdagangan Melalui Sarana Elektronik (PMSE) atau yang dikenal dengan pelaku *e-commerce* dengan tim Neraca dan K/L terkait. Tim SBR juga tergabung dalam tim penyiapan Economic Wide Survey (EWS) yang merupakan cikal bakal survei terintegrasi di BPS.

Rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan SBR pada tahun 2020 ini dirangkum dalam laporan *Statistical Business Register 2020*.

## **6. Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2020**

Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2020 merupakan kumpulan dokumentasi laporan konsultasi klasifikasi statistik. Laporan tersebut disusun berdasarkan pengumpulan laporan konsultasi klasifikasi statistik yang dilakukan pada Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik (PSKS) dalam rangka dokumentasi laporan untuk pengembangan klasifikasi di masa yang akan datang. Bentuk media konsultasi dapat melalui:

- Sistem Informasi Layanan Statistik (SILASTIK), sebelumnya Sistem Pencarian Klasifikasi (SPK) Online;
- Telepon ke Subdit. PSKS;
- Kunjungan ke Subdit. PSKS; dan
- Media lainnya, seperti Email, WhatsApp (WA), surat dan lainnya.

Kegiatan konsultasi klasifikasi statistik menggambarkan kebutuhan kode klasifikasi statistik dari pengguna. Pengguna menggunakan media yang telah disediakan untuk mengkonfirmasi kode yang tepat atau bertanya mengenai kode klasifikasi yang menjadi kebutuhannya. Pengguna media konsultasi yang menanyakan kode klasifikasi statistik ke Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik (PSKS) selama tahun 2020 sebanyak 98 dokumen penanya, baik melalui SILASTIK, telepon, kunjungan ke subdirektorat PSKS maupun melalui media lain seperti email, WA atau surat.

Pada tahun 2020 media SPK Online sedang mengalami transisi ke aplikasi yang terbaru yaitu Sistem Pembakuan (SIBAKU) yang konsultasinya sudah di-inlinekan dengan SILASTIK, sehingga penyesuaian penggunaan SILASTIK menjadi salah satu persoalannya. Selain persoalan tersebut juga ada masa pandemik Covid 19, yang mengakibatkan media lain seperti telepon dan kunjungan yang semakin menurun. Konsultasi melalui telepon dan kunjungan langsung mengharuskan petugas dan pengguna melakukan konsultasi secara offline, namun pada masa pandemik karena dilakukan pembatasan sehingga layanan offline menjadi kurang optimal karena adanya petugas yang WFH dan WFO. Persoalan tersebut menjadikan penurunan jumlah dokumen laporan konsultasi statistik.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik serta penyusunan dan pengembangan *Statistical Business Register* :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Terbatasnya SDM TI yang dapat mengembangkan dan membangun sistem berbasis website/aplikasi guna mengakomodasi kebutuhan dari penerapan atas petunjuk teknis standar data, klasifikasi statistik, dan SBR agar berjalan efektif dan efisien; saat ini masih mengandalkan pengembang sistem (*developer*) Direktorat PMSS yang tidak hanya mengerjakan sistem tetapi juga mengerjakan proses bisnis rutin terkait pengembangan konten/ pemeliharaan standar data, klasifikasi statistik, dan SBR. Hal ini ke depan dapat menjadi kendala karena volume pekerjaan yang terus meningkat dengan ditetapkannya Peraturan Badan terkait KBLI dan standar data statistik serta integrasi data SBR yang melibatkan lintas unit kerja dan lintas K/L. Permintaan bantuan pengembangan dari fungsi Direktorat SIS yang diperoleh terbatas, tidak ada tim yang khusus berfokus hanya melayani satu fungsi klasifikasi, standar data, dan SBR dimana belum mendapatkan prioritas utama dalam penyelesaiannya dibandingkan pengembangan sistem fungsi/subdirektorat lain.
- Diperlukan Seksi atau Sub Koordinator SBR tersendiri yang terpisah dari Sub Koordinator Klasifikasi dan Standardisasi; disamping juga terbatasnya SDM dalam menangani kebutuhan SBR yang semakin banyak dan besar dari berbagai aspek.

2. Koordinasi dan Sosialisasi

- Belum berjalannya koordinasi di internal BPS sendiri maupun BPS dengan K/L dalam hal Standar Data Statistik dan SBR
- Kurangnya pemahaman baik internal BPS sendiri maupun di Kementerian/Lembaga dalam penerapan petunjuk teknis standar data statistik
- Terbatasnya sisi anggaran dalam melakukan sosialisasi produk/output seperti standar data statistik dan KBLI.

### 3. Volume/ beban pekerjaan

- Tindak lanjut implementasi Peraturan Badan Pusat Statistik terkait Standar Data Statistik dan KBLI 2020 memerlukan pembinaan/ layanan yang semakin meluas dan meningkat kepada internal/eksternal BPS dalam kaitannya dengan Satu Data Indonesia.
- Meningkatnya sumber data untuk mengupdate SBR baik internal maupun eksternal untuk diintegrasikan dan dimutakhirkan secara berkelanjutan.
- Meningkatnya permintaan data SBR untuk kerangka induk (*master frame*) survei berbasis perusahaan/usaha secara berkelanjutan.
- Kebutuhan pengembangan dan penyusunan metodologi integrasi data SBR, standar data, klasifikasi statistik dan penyusunan output yang belum memiliki proses bisnis yang efisien dan sarana yang memadai untuk dapat memberikan output yang berkualitas dan mendukung berbagai kebutuhan berbagai pengguna termasuk kebutuhan data baru terkait isu-isu dampak fenomena statistik terkait pandemi, digitalisasi, globalisasi, dan sustainability.

### 4. Konten dan Support Data

- Diperlukan tersedianya sumber data kependudukan dan luas wilayah pada level desa yang terupdate sesuai dengan kondisi data potensi desa (podes) yang dipakai pada tahun berjalan yang digunakan dalam penghitungan skoring klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan.
- Updating SBR dengan metode survey feedback masih belum terintegrasi dan belum mencakup seluruh subject matter sehingga updating hanya dilakukan pada sebagian data SBR.
- SBR belum memiliki sumber data administratif yang mengalirkan datanya secara rutin untuk meminimalisasi kegiatan pemutakhiran lapangan karena proses bisnis terintegrasi belum terbentuk.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik serta penyusunan dan pengembangan *Statistical Business Register*:

1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi KBLI sebagai salah satu instrumen Satu Data Indonesia.
2. Penentuan unit yang bertanggung jawab terhadap klasifikasi statistik di BPS Daerah belum secara formal ditentukan, mengupayakan berkoordinasi dengan Kepala Bidang IPDS Seluruh Indonesia untuk sementara merupakan tugas kepala seksi Jaringan dan Rujukan Statistik BPS Daerah.

3. Mengusulkan ke pimpinan dan berkoordinasi dengan bagian hukum untuk dapat membentuk unit kerja khusus untuk menangani SBR, walaupun sampai saat ini belum bisa terlaksana.
4. Meningkatkan koordinasi antara SBR dan *subject matter* , untuk menyepakati pembangunan tatakelola transfer data hasil survei.
5. Berkoordinasi dengan *subject matter* untuk mengisi variabel SBR yang belum terisi
6. Berkoordinasi dengan tim Neraca Nasional untuk upaya peningkatan pemahaman SNA melalui *Focus Group Discussion (FGD)* ataupun *capacity building*.
7. Data luas wilayah menggunakan data luas pemetaan walaupun tidak sepenuhnya match dengan podes dan data jumlah penduduk menggunakan proporsi dari data penduduk hasil proyeksi dan menggunakan data hasil SP2020 sementara.
8. Dalam masa transisi updating SBR dilakukan secara bertahap dengan *subject matter* tertentu sebagai *prototype* yang akan dikembangkan kepada *subject matter* lainnya dengan membangun petunjuk teknis pemutakhiran survey feedback dan data administratif pada tahun 2020.
9. Menindaklanjuti MoU Pertukaran Data BPS dan Kementerian Keuangan pada tahun 2019 untuk mendapatkan data wajib pajak sebagai bahan untuk memperbarui data BPS secara terus menerus dan inisiasi kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya, dalam hal ini terkait dengan SBR.

**Indikator Kinerja 4: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)**

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dibutuhkan master dan peta wilayah kerja statistik yang *up to date* dan berkualitas. Untuk memperoleh tujuan tersebut, setiap tahun Direktorat PMSS melakukan pemutakhiran master dan peta wilayah kerja statistik dengan memanfaatkan teknologi mulai dari proses updating wilkerstat sampai dengan pengiriman hasil peta yang diupdate. Capaian indikator dalam bentuk persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Turunan: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>Indikator Turunan IKU</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Capaian Indikator Turunan</b>	<b>Capaian IKU</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya master dan peta wilayah kerja	Persentase master wilkerstat yang diupdate	Subdit Pengembangan Kerangka Sampel	Persentase master wilkerstat yang diupdate terhadap	100 %

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Turunan IKU	Penanggung Jawab	Capaian Indikator Turunan	Capaian IKU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
statistik yang mutakhir dan berkualitas			perubahan wilkerstat yang dilaporkan = 100 %	
	Persentase peta wilkerstat yang diupdate	Subdit Pengembangan Pemetaan Statistik	Persentase peta wilkerstat yang diupdate terhadap perubahan wilkerstat yang dilaporkan = 100 %	

## Pemutakhiran Master Wilayah Kerja Statistik

### a. Pemutakhiran Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS)

Pemutakhiran data wilayah kerja statistik meliputi wilayah administrasi dan blok sensus dilakukan melalui sistem MFD dan MBS berbasis web oleh BPS Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang dilakukan secara rutin 2 kali selama setahun yaitu periode Januari-Juni dan Juli-Desember. Sebelum akhir periode, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan ke Subdit. Pengembangan Kerangka Sampel dalam format Berita Acara baik ada perubahan maupun tidak ada perubahan diwilayahnya. Capaian yang ingin dilihat adalah kelengkapan dokumen dan database serta ketepatan waktu pemutakhiran yang dilakukan oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Persentase master wilayah kerja statistik yang diupdate terhadap perubahan wilayah yang dilaporkan mencapai 100 persen.

Pemutakhiran Master Wilkerstat Semester 1 Semester 2 Tahun 2020 melalui MFDONLINE menghasilkan jumlah master sebagai berikut:

**Tabel 3.4. Jumlah Master Wikerstat yang Dimutakhirkan pada Tahun 2020**

Master Wilkerstat	Jumlah Master Wilkerstat	
	2020 Semester 1	2020 Semester 2
Provinsi	34	34
Kabupaten/Kota	514	514
Kecamatan	7.263	7265
Desa/Kelurahan	83.831	82.839
Blok Sensus	845.657	845.658

**b. Pemutakhiran Master Wilkerstat Satuan Lingkungan Setempat (SLS) dalam rangka SP2020**

Selain pemutakhiran yang dilakukan rutin, pada tahun 2020 dilakukan pemutakhiran wilkerstat Satuan Lingkungan Setempat (SLS) untuk keperluan penyusunan kerangka induk SP2020. Kegiatan yang dilakukan meliputi updating SLS pada kegiatan Rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam), pembentukan SubSLS untuk SLS yang bermuatan besar, dan updating SLS untuk pelaksanaan lapangan SP2020 bulan September. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah peta wilkerstat, master dan muatan SLS/Non SLS. Hasil kegiatan ini juga digunakan sebagai dasar hitung untuk pengalokasian petugas Sensus Penduduk 2020.

**Tabel 3.5. Jumlah Master Wikerstat SLS yang Dimutakhirkan pada Tahun 2020**

<b>Master Wilkerstat SLS</b>	<b>Jumlah Master Wilkerstat SLS</b>
<b>Pemetaan 2019</b>	1.179.557
<b>Rakorcam SP 2020</b>	1.183.091
<b>SP2020 Lapangan September 2020</b>	1.184.431

**c. Pembentukan Wilkerstat Blok Sensus 2020**

Selain melakukan pemutakhiran wilkerstat BS2010, pada tahun 2020 juga dilakukan pembentukan master wilkerstat baru yaitu BS2020 sebagai dasar perencanaan kegiatan survei selama 10 tahun mendatang. Tahapan Pembentukan BS2020 dimulai dari tahap persiapan yaitu membuat petunjuk teknis yang dituangkan dalam Buku Pedoman Pembentukan BS2020, Pelatihan Innas yang dihadiri oleh Kasi Jaringan dan Rujukan Statistik BPS Provinsi, Pelaksanaan pengolahan, Evaluasi, dan Finalisasi BS2020. Jumlah BS2020 hasil kegiatan ini sebanyak 855.025 BS yang terdiri dari 738.142 BS Biasa, 2859 BS Khusus, dan 114.022 BS Persiapan. Hasil pembentukan BS ini akan digunakan sebagai data dasar pada pelaksanaan SP2020 Lanjutan (Long Form) dan survei-survei bidang sosial pada tahun 2021.

Masalah/kendala yang dihadapi:

1. Proses bisnis updating SLS belum terakomodir melalui aplikasi MFDOnline yang ada saat ini sehingga proses updating dilakukan manual. Beberapa kendala akibat proses manual ini antara lain:
  - beberapa data yang dikirim dari daerah tidak konsisten dengan data sebelumnya,

- tidak adanya validasi menyebabkan beberapa data tidak valid karena kesalahan input
2. Belum terintegrasinya pengelolaan master dan peta wilkerstat
  3. Masih ada perbedaan jumlah desa hasil updating MFD dengan jumlah desa hasil kegiatan Potensi Desa. Perbedaan ini terjadi akibat kedua kegiatan ini mempunyai konsep dan tujuan yang berbeda.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Mengajukan kegiatan pembangunan ulang aplikasi MFDOnline untuk mengakomodir proses updating Master Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Pengajuan dilakukan melalui aplikasi pelayanan IT BPS yaitu halosis.bps.go.id
2. Merancang pembangunan Frame Register System yang terintegrasi dengan geospasial sistem untuk mengelola master dan peta yang sinkron.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait antara lain Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang menangani Survei PODES. Setelah dilakukan kooordinasi sudah disepakati bahwa data yang dihasilkan memang berbeda secara konsep dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga pada sistem MFDOnline sebagian perbedaan data tersebut tetap disajikan dengan diberikan beberapa catatan agar pengguna data dapat menggunakan informasinya secara bijak. Pada penyusunan kuesioner PODES selanjutnya digagas untuk menyediakan predefined data sebagai data awalan yang berasal dari data-data yang dihasilkan Direktorat PMSS, sehingga perbedaan data akan diminimalisir di kemudian hari.

## **Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik**

### **a. Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 (desa/kelurahan) yang mutakhir**

Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilkerstat SP2020 yang dilakukan tahun 2019 telah menghasilkan kerangka wilkerstat setingkat desa dan SLS yang digunakan untuk pencacahan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) di tahun 2020. Dalam pelaksanaan SP2020, kerangka wilkerstat berupa master kode dan nama wilkerstat yang digunakan bersumber dari MFD tahun 2019 semester 1, yang dimutakhirkan hingga kondisi bulan Februari tahun 2020 pada kegiatan Rakor Kecamatan (Rakorcam). Namun saat pelaksanaan lapangan SP2020 di bulan September 2020, perubahan atau perkembangan yang terjadi di lapangan tetap dapat dilaporkan untuk digunakan sebagai master. Sehingga peta wilkerstat yang digunakan pun mengalami perbaikan oleh petugas.

Laporan peta desa yang mutakhir dituangkan dalam Perka BPS tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik. Laporan tahun 2019 ada pada Peraturan Kepala BPS Nomor

1 Tahun 2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2019. Dalam Perka tersebut, jumlah desa yang dimutakhirkan kondisi 2019 adalah sejumlah 83.813 desa yang sudah termasuk juga di dalamnya kelurahan dan unit pemukiman transmigrasi (UPT).

Seiring berjalannya waktu, kondisi desa/kelurahan dan SLS/non SLS mengalami perubahan atau perkembangan. Secara bertahap, BPS daerah melakukan pemutakhiran wilkerstat agar saat pendataan lapangan SP2020 tidak terjadi kendala.

Kemudian pada bulan Februari 2020 dilaksanakan kegiatan Rakorcam yang dihadiri oleh kepala/aparat desa di kecamatan setempat yang bertujuan untuk membangun koordinasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran pemerintahan wilayah administrasi terkecil, menyebarkan informasi tentang SP2020, serta melakukan konfirmasi kondisi desa dan SLS. Dari hasil Rakorcam diperoleh informasi perubahan desa dan SLS baik dari batas maupun jumlah, sehingga master wilkerstat untuk SP2020 dimutakhirkan sesuai hasil Rakorcam.

Pada saat pencacahan lapangan SP2020 di bulan September tahun 2020, petugas sensus masih menemukan perubahan wilayah desa dan SLS. BPS kabupaten/kota dibolehkan untuk melaporkan perubahan tersebut dalam rangka memutakhirkan kembali master wilkerstat SP2020 sehingga pendataan sesuai dengan kondisi wilayah di lapangan terkini.

Berdasarkan perkembangan pemutakhiran SLS/non SLS dari kondisi tahun 2019 semester 1 (kondisi RD) sampai dengan kondisi lapangan SP2020 (September 2020), ada perubahan jumlah desa/kelurahan, namun tidak banyak (hanya 8 desa di 3 provinsi). Namun secara peta, terdapat 290 peta desa/kelurahan yang mengalami pemutakhiran (termasuk batas wilayah). Hal ini dapat diketahui dari Geospatial System (GS), yang merupakan sarana untuk mengatur/manajemen peta digital (upload, download, dan pengecekan peta). Jumlah ini melebihi target awal yang hanya sebesar 200 pemutakhiran desa/kelurahan menjadi 290 peta desa/kelurahan. Hal ini menunjukkan tingkat capaiannya melebihi 100%, yaitu sebesar 145%.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. Perubahan informasi desa dan SLS/non SLS yang begitu cepat sering kali tidak dapat secara otomatis diupdate.
2. Belum terintegrasinya sistem MFD online dengan *Geospatial System*, sehingga perubahan nama dan/atau kode wilkerstat tidak otomatis berubah pada atribut peta digital, demikian pula dengan perubahan batasnya.



Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

1. Segala perubahan dicatat oleh kabupaten/kota dan secara bertahap pemutakhiran dilaporkan dalam periode yang telah ditentukan.
2. Pemutakhiran master wilayah dengan pemutakhiran petanya masih dilakukan secara manual. Diharapkan ke depannya, saat peta desa diupdate secara spasial dan tabularnya, maka pada sistem master wilayahnya juga ikut ter-update, sehingga integrasi antar sistem sangat diperlukan.

**b. Jumlah peta blok sensus**

Pada tahun 2020 telah dilakukan kegiatan penyusunan master dan peta blok sensus 2020 (BS2020). Pembentukan peta BS2020 didasarkan pada peta Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang telah dihasilkan di tahun 2019 yang terbagi-bagi ke dalam jumlah muatan yang seragam dan telah ditentukan. Pembentukan BS2020 ini akan digunakan sebagai kerangka induk dalam pelaksanaan kegiatan sensus dan survei selama kurun waktu 10 tahun ke depan.

Pembentukan master dan peta BS2020 telah diselesaikan oleh masing-masing kabupaten/kota pada Desember 2020. Tingkat capaian indikator jumlah peta blok sensus 2020 ini mencapai 94,7%, dimana target sebesar 900.000 peta blok sensus, sementara realisasinya 851.162 peta blok sensus. Tingkat capaian realisasi yang kurang dari target disebabkan oleh adanya perubahan konsep mengenai jumlah muatan dalam pembentukan satu blok sensus. Pada tahun 2010, pembentukan blok sensus didasarkan pada muatan berkisar 80-120 KK/BSTT, BSBTT, BSTTK, namun pada tahun 2020 muatan yang ditetapkan dalam pembentukan BS2020 adalah 120-180 KK/BSTT, BSBTT, BSTTK. Dengan demikian, jumlah BS2020 yang dihasilkan menjadi berkurang dari target yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan pembentukan peta blok sensus, tidak terlepas dari beberapa masalah dan kendala. Namun demikian, berbagai mitigasi dan solusi sudah diupayakan baik secara teknis maupun administrasi. Berikut diuraikan masalah/kendala dan solusi yang telah dilakukan.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. SDM di kabupaten/kota non organik yang belum menguasai software GIS sehingga mengalami kesulitan dalam memahami materi yang bersifat aplikatif.
2. Kualitas signal/jaringan internet yang tidak stabil mengakibatkan terjadinya *lag* saat penyampaian materi kepada petugas.
3. Adanya proses yang terlewat atau kesalahan dalam digitasi penyesuaian batas blok sensus sehingga pembentukan BS tidak optimal.

4. Adanya SLS kantong yang membingungkan dalam pembentukan blok sensus.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

1. Untuk masalah SDM, dilakukan briefing kepada petugas mengenai tahapan penggunaan software QGIS. Materi praktek dan contoh studi kasus juga diperbanyak.
2. Untuk mengatasi masalah signal selama pelatihan, rekaman pelatihan dan materi dibuatkan dalam bentuk video dan softcopy file buku pedoman yang dapat diputar ulang oleh peserta.
3. Adanya kesalahan atau proses pengolahan yang terlewat diberikan solusi dengan memberi tanda/flag peta Blok Sensus.
4. Permasalahan SLS kantong perlu dipecah menjadi blok sensus tersendiri.

**c. Peraturan Badan Pusat Statistik tentang kode dan nama wilayah kerja statistik**

Di tahun 2020, Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kode dan nama wilayah kerja statistik diterbitkan dalam bentuk publikasi pada web BPS, yaitu Peraturan BPS tentang kode dan nama wilayah kerja statistik kondisi tahun 2019 semester 1 dan kondisi tahun 2019 semester 2. Untuk Peraturan BPS kondisi tahun 2020 semester 1 sudah selesai dibuat, namun masih menunggu hasil dari proses pengusulan di Biro Humas dan Hukum – Kemenkum HAM.

Laporan peta desa yang mutakhir kondisi 2019 semester 2 dituangkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik. Dalam Peraturan tersebut, jumlah desa yang dimutakhirkan kondisi 2019 Semester 2 adalah sejumlah 83.820 desa yang sudah termasuk juga di dalamnya kelurahan dan unit pemukiman transmigrasi (UPT). Sementara itu, berdasarkan Peraturan BPS tentang kode dan nama wilayah kerja statistik kondisi 2020 semester 1 yang masih dalam proses pengesahan, jumlah desa mutakhir yang dilaporkan berjumlah 83.831 desa/kelurahan.

Tingkat capaian indikator Peraturan BPS tentang kode dan nama wilayah kerja statistik sudah mencapai 100%, dengan target dan realisasi masing-masing 2 Perka. Masalah dan kendala yang dihadapi dan strategi mengatasinya dalam mencapai indikator kinerja ini dijelaskan sebagai berikut.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. Proses pengesahan Peraturan memerlukan waktu yang lama.
2. Kapasitas file yang besar menyebabkan dokumen Peraturan tidak dapat di-*upload* ke dalam sistem.

Strategi untuk mengatasi kendala adalah:

1. Menunggu proses yang dilakukan Biro Humas dan Hukum sesuai prosedur yang telah ditentukan.
2. Pengiriman file dokumen dilakukan melalui email.

#### **Indikator 5: Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei**

Secara umum, pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik yang dilakukan oleh Direktorat PMSS dapat dikelompokkan menjadi 5 kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.6. Jenis Pembinaan/Konsultasi/Kerja Sama pada Direktorat PMSS**

No	Jenis Pembinaan dan/atau kerja sama	Jumlah
1	Kerjasama penyusunan metodologi sampling survei sektoral (desain sampling, daftar sampel dan peta wilkerstat)	6
2	Layanan konsultasi klasifikasi statistik	98
3	Pelatihan klasifikasi statistik	47
4	Konsultasi dan kerjasama pemanfaatan peta	3
5	Konsultasi terkait metodologi survei	4
	Jumlah	158

#### **Kerjasama Penyusunan Metodologi Sampling Survei Sektoral**

Pada tahun 2020, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei melakukan kerja sama penyusunan metodologi sampling survei-survei statistik sektoral, yaitu:

1. Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) / Survei Determinan Status Gizi (SDSG) yang dilaksanakan oleh Balitbang-Kementerian Kesehatan. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan daftar pemutakhiran, penyediaan peta wilayah, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.
2. Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) yang dilakukan oleh Balitbang-Kementerian Kesehatan. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan daftar sampel rumah tangga, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.
3. Survei Pengukuran Indeks Kepuasan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan daftar sampel

- rumah tangga, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.
4. Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh BKKBN. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel desa/kelurahan, dan konsultasi terkait metode sampling.
  5. Assesment Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 terhadap rumah tangga di Indonesia yang dilakukan oleh UNICEF. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan daftar sampel rumah tangga, penyediaan peta wilayah, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.
  6. *Population-based sero-survey* Covid-19 di Provinsi Bali yang dilakukan oleh UNICEF. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan daftar sampel rumah tangga, penyediaan peta wilayah, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.

Secara keseluruhan kerjasama bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap K/L agar bisa menyusun kerangka sampel sesuai kaidah survei serta dapat melakukan pemilihan sampel yang menggunakan *probability sampling* sehingga kualitas statistik sektoral yang dihasilkan menjadi baik. Tantangan yang dihadapi adalah dibutuhkan penyusunan petunjuk teknis yang baku dalam hal penyusunan kerangka sampel dan pemilihan sampel sesuai dengan standar penyelenggaraan kegiatan statistik yang baik.

### **Pembinaan, Kerjasama dan Konsultasi Klasifikasi Statistik**

Jumlah pembinaan dan/atau kerjasama kegiatan statistik terkait klasifikasi statistik dapat diketahui melalui jumlah permintaan layanan konsultasi klasifikasi Kementerian/lembaga/institusi/ perorangan dan jumlah undangan narasumber dari Kementerian/Lembaga.

Layanan Konsultasi Klasifikasi Statistik disediakan untuk berbagai kalangan pengguna klasifikasi statistik baik pegawai internal BPS untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sensus/survei BPS, maupun pihak eksternal yaitu institusi pemerintah, perusahaan, dan perorangan. Laporan konsultasi klasifikasi statistik disusun dalam rangka pendokumentasian kegiatan konsultasi dan penyesuaian dengan perubahan perekonomian, khususnya kode klasifikasi yang sering berhubungan dengan kebutuhan pengguna, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai klasifikasi statistik yang belum secara eksplisit terjawab dari deskripsi publikasi klasifikasi statistik baik KBLI, KBJI, maupun KBKI. Hal ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan/revisi klasifikasi. Di samping itu,

laporan menjadi acuan bagi tim layanan konsultasi ke depan dalam memberikan rekomendasi kode klasifikasi statistik yang tepat sehingga meningkatkan kualitas data yang berhubungan dengan penggunaan klasifikasi. Jumlah konsultasi pada periode penyusunan laporan tahun 2020 (Oktober 2019 s.d. September 2020) mencapai 98 dokumen penanya, baik melalui SPK Online, telepon, kunjungan langsung, email, WA, maupun surat ke Direktorat PMSS.

Sedangkan untuk kegiatan pembinaan/ pelatihan klasifikasi statistik kepada Kementerian/ Lembaga terkait klasifikasi statistik sebagai narasumber yang melibatkan peserta dalam grup/ sekelompok orang/ unit kerja instansi berdasarkan permintaan/ undangan pada tahun 2020 terhitung 47 kegiatan. Dengan demikian, total pembinaan, kerjasama, dan konsultasi klasifikasi statistik pada tahun 2020 sebanyak 145 kegiatan.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

- Pandemi Covid 19, yang mengakibatkan layanan media tatap muka langsung seperti telepon dan kunjungan menjadi kurang optimal.
- Media SPK Online sedang mengalami transisi ke aplikasi yang terbaru yaitu Sistem Pembakuan (SIBAKU) dan MMS yang konsultasinya sudah di-inlinekan dengan SILASTIK
- Sibaku Online belum dapat diakses secara publik sebagai salah satu cara pencarian klasifikasi statistik.

Strategi yang diambil untuk mengatasi masalah/kendala:

- Mengoptimalkan pengalihan layanan melalui daring menggunakan Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik).
- Menyempurnakan transisi ke aplikasi yang terbaru dan menambah fungsi-fungsi dari sistem lama untuk mengoptimalkan sistem yang baru.

### **Konsultasi dan Kerjasama Pemanfaatan Peta Statistik**

#### **Jumlah permintaan penyusunan pengembangan pemetaan (tematik, SIG, dan muatan peta wilayah) yang ditindaklanjuti**

Peta digital wilkerstat yang dijelaskan di subbab ini adalah peta yang dimanfaatkan untuk kegiatan survei di luar BPS selama kurun waktu tahun 2020. Beberapa kegiatan permintaan data spasial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendataan statistik pariwisata dengan melakukan pengumpulan data koordinat geografis dari lokasi-lokasi jasa pariwisata seperti objek wisata, hotel, restoran, dan lain-lain.

2. Permintaan peta wilkerstat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SLS dan peta titik infrastruktur untuk peta resiko bencana Covid-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
3. Permintaan pepadanan daftar desa/kelurahan (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) Kementerian Sosial dengan master file desa/kelurahan BPS dari Kementerian Sosial dan permintaan pepadanan daftar desa/kelurahan (Data Dukcapil Kemendagri) dengan master file desa/kelurahan BPS tahun 2019 dari Kemendikbud.

Jumlah permintaan penyusunan pengembangan pemetaan di tahun 2020 sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 5 permintaan. Tingkat pencapaiannya mencakup 100%. Selain kegiatan rutin yang dilakukan oleh *subject matter*, peta wilkerstat juga digunakan untuk kebutuhan survei lainnya, yang terutama adalah untuk kegiatan survei penanganan Covid-19.

Masalah /kendala yang dihadapi adalah:

1. Beberapa peta sampel blok sensus tidak tersedia pada *storage*.
2. Terdapat perbedaan master wilayah pada daftar sampel dengan file peta yang tersedia sehingga memerlukan waktu yang lama dalam menyesuaikannya.
3. Format file/dokumen yang tidak standar menyebabkan proses pemilihan peta membutuhkan waktu yang cukup lama.
4. Untuk permintaan peta tematik, template selalu berubah dengan adanya penambahan data atau dasar hitung.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

1. Untuk dokumen peta BS yang tidak tersedia dilakukan pemilihan BS pengganti atau jika peta tidak tersedia maka digunakan peta desa dimana wilayah BS tersebut berada.
2. Adanya perbedaan master wilayah dengan file peta diatasi dengan membuat penyesuaian daftar BS sampel terpilih dengan cara meminta ke *subject matter* untuk kondisi 2010 dan dilakukan pairing manual.
3. File format yang tidak standar perlu dilakukan konversi terlebih dahulu agar memudahkan pencarian sampel terpilih.
4. Untuk permasalahan peta tematik, penyesuaian dilakukan antara peta dan data sebelum peta tematik disusun.

### **Konsultasi Metodologi Survei Sektoral**

Pada tahun 2020, Subdit Pengembangan Desain Sensus dan Survei melakukan beberapa pelayanan konsultasi dan sampling survei-survei statistik sektoral. Pembinaan dilakukan di antaranya dengan berperan aktif sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan oleh K/L tersebut dan juga K/L yang lainnya seperti narasumber terkait audit sampling di BPK, narasumber sampling untuk Global Adult Tobacco Survey (GATS) di Balitbang-Kementerian Kesehatan, narasumber sampling untuk Survei Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 terhadap Perempuan (BAPPENAS-MAMPU) di BAPPENAS dan narasumber sampling untuk Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di BNN.

### **Sistem Aplikasi yang Dibangun dan Dipelihara oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei**

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung tercapainya hasil kegiatan yang berkualitas, maka pada tahun 2020 Direktorat PMSS melakukan pembangunan dan pemeliharaan beberapa sistem aplikasi. Sistem-sistem ini digunakan untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis dan evaluasi dampak dengan diseminasi kegiatan. Sistem aplikasi yang dibangun dan dipelihara antara lain:

#### **1. Aplikasi Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS (MFDOnline)**

MFDONLINE merupakan Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS Berbasis Web yang digunakan untuk mengumpulkan informasi perubahan wilayah serta melakukan pemeliharaan master wilkerstat. Output Aplikasi MFDONLINE dapat memberikan informasi sejarah perubahan wilayah yang dapat dicatat dari waktu ke waktu dan menghasilkan Daftar Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat). Wilkerstat yang lebih dikenal dengan Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS) dijadikan rujukan dalam kegiatan sensus dan survei BPS dari tahap perencanaan sampai dengan diseminasi hasilnya. Sejak tahun 2010 Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS atau MFDONLINE mulai diimplementasikan untuk merekam perubahan wilayah yang terjadi sampai tingkat blok sensus. Hasil pemutakhiran dirilis per semester dalam setiap tahunnya berupa Peraturan Kepala BPS tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik.

Sistem MFD Online sejak pertama kali diimplementasikan 2010 telah mengalami pengembangan guna meningkatkan performa dan melengkapi fasilitas yang ada. Secara fungsi dan manfaat sistem yang ada sampai sekarang telah dapat memberikan hasil guna yang baik untuk memenuhi kebutuhan akan informasi perubahan master wilkerstat. Namun perlu penyesuaian dari sisi teknologi mengingat kebutuhan hubungan antar-sistem yang makin berkembang.

Masalah yang dihadapi Sistem MFD Online belum dibangun mengikuti perkembangan teknologi, saat ini belum bisa berkomunikasi dengan sistem lain melalui pertukaran services (API) sedangkan hampir seluruh sistem memerlukan master wilkerstat.

Strategi yang diambil melakukan *re-engineering* dan *re-build* sistem pemutakhiran master wilkerstat. Pengajuan pembangunan sistem sudah dilakukan pada bulan Juni 2020 melalui [halosis.bps.go.id](http://halosis.bps.go.id). Pembangunan yang dilakukan oleh Direktorat SIS diharapkan akan lebih mudah dirancang agar sistem dapat terkoneksi dengan sistem lainnya di BPS.

## 2. Aplikasi Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Statistik Sibaku Online dan Sibaku Mobile

Dengan semakin meningkatnya pengguna klasifikasi, baik oleh kalangan internal maupun eksternal BPS, maka diperlukan suatu sarana untuk memudahkan para pengguna klasifikasi dalam mencari suatu kode, judul, atau deskripsi klasifikasi. Dalam rangka memfasilitasi pengguna, maka Direktorat PMSS telah mengembangkan suatu sistem aplikasi pencarian kode klasifikasi berbasis *web* (SPK Online) pada tahun 2010. Dalam perkembangannya, SPK Online telah didukung dalam bentuk sistem aplikasi multiplatform, yang tidak hanya berbasis *web*, tetapi juga berbasis desktop dan *mobile*. Sistem aplikasi berbasis desktop, yang diberi nama SPK *Offline*, ditujukan untuk penggunaan operasional petugas/pengawas lapangan tanpa memerlukan koneksi internet. Sedangkan sistem aplikasi berbasis *mobile* yaitu SPK Android, ditujukan untuk kemudahan pencarian dengan menggunakan *smartphone* dengan sistem operasi Android. SPK Online juga dikembangkan dengan penambahan modul Standarisasi Lapangan Usaha (Standlapus) yang mencakup fungsi pendokumentasian hasil diskusi pertanyaan-pertanyaan KBLI yang dikhususkan untuk penggunaan internal Subdirektorat PSKS. Dengan dikembangkannya Standlapus, pelayanan klasifikasi statistik yang diberikan dapat lebih optimal dan terjaganya kesamaan pemahaman klasifikasi statistik antara tim klasifikasi statistik.

Pada tahun 2020, sistem aplikasi SPK dikemas ulang dengan nama baru yaitu Sistem Pembakuan Statistik (Sibaku) agar lebih mudah diingat oleh pengguna. SPK Online dikemas ulang menjadi Sibaku Online dan SPK Android dibangun ulang menjadi tidak hanya berbasis Android tetapi juga berbasis iOS menjadi Sibaku Mobile. Desain ulang SPK dimaksudkan agar penyebaran informasi dan pencarian kode berjalan lebih efektif, yakni dengan membuatnya lebih ramah pengguna. Sibaku Online dan Sibaku Mobile telah diluncurkan secara resmi dalam rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional 2020 bersamaan dengan peluncuran publikasi KBLI 2020. Sibaku Mobile juga sudah tersedia untuk publik pada marketplace android (Play Store) dan iOS (App Store).

Sibaku Online merupakan sistem aplikasi transisi yang bersifat *landing page* (link ke sistem aplikasi lain) dan hanya pengemasan ulang dari fitur-fitur SPK Online. Hal ini dikarenakan SPK Online akan dimigrasikan ke platform metadata yang terintegrasi dengan Direktorat Diseminasi Statistik yaitu *Metadata Management System (MMS)*. Proses migrasi



basis data statistik sudah dilakukan untuk klasifikasi terbaru yaitu KBJI 2014, KBLI 2015, dan KBKI 2015. Perancangan desain dan analisis sistem dilakukan bersama tim MMS.

Fitur-fitur Sibaku Online meliputi menu klasifikasi statistik (pencarian, tabel kesesuaian, tanya kode (diarahkan ke Silastik), dan unduh publikasi klasifikasi (diarahkan ke halaman website BPS) dan standar data (pencarian standar data versi 1 dan uji coba pengajuan usulan standar data). Menu layanan konsultasi klasifikasi statistik telah diintegrasikan ke Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik). Sedangkan fitur-fitur Sibaku Mobile yang dikembangkan pada tahun 2020 meliputi:

1. Mencari Kode (saat membuka aplikasi / pada home)
2. Mencari Kode pada hlm detail kode dengan jenis klasifikasi yang sama
3. Mencari Kode pada hlm detail kode dengan jenis klasifikasi yang berbeda
4. Mengatur, filter hasil pencarian
5. Mencari berdasarkan pencarian terakhir

Masalah/kendala yang dihadapi dalam pengembangan MMS, Sibaku Online dan Sibaku Mobile:

1. Terdapat kendala keamanan source code yang belum lulus uji keamanan jaringan sehingga Sibaku Online terpaksa ditutup kembali akses publik dan hanya bisa diakses internal melalui jaringan VPN.
2. SDM yang dimiliki tidak hanya fokus dalam pengembangan sistem Sibaku dan MMS saja karena adanya beban pekerjaan lain yang bersamaan waktu.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala:

1. Pemilihan fitur prioritas untuk pengembangan Sibaku Online dan Sibaku Mobile
2. Berkonsultasi dengan Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data untuk pengecekan jaringan dan identifikasi permasalahan. Link Sibaku Online selama masa perbaikan uji keamanan dikembalikan untuk sementara ke halaman SPK Online.
3. Migrasi database klasifikasi dibantu tim Subdirektorat Pengembangan Basis Data.
4. Melakukan evaluasi pengembangan fitur-fitur dan ekstensi sistem SPK Online untuk dicakup dalam spesifikasi Metadata System.

### 3. Aplikasi Sistem Statistical Business Register (SBR)

Pengembangan sistem SBR dimulai pada tahun 2019, dimana Sistem SBR menjadi salah satu modul yang tergabung dalam Sistem Frame and Register (*Frame Register System/FRS*), dengan nama Modul Pengelolaan Data Bisnis. Pengembangan FRS (termasuk didalamnya modul SBR), dikembangkan oleh pihak ke-3 dengan sistem lelang. Akan tetapi

sampai akhir tahun 2019, FRS belum dapat diselesaikan dan progress nya mencapai 90,14%. Khusus untuk Modul Pengelolaan Data Base (SBR), disebutkan bahwa pencapaian deliverable menjadi milik PPK, dalam hal ini BPS.

Terkait hasil akhir pengembangan FRS yang belum selesai, pada tahun 2020, diputuskan untuk melakukan pengembangan yang berfokus pada Modul Pengelolaan Database Bisnis atau SBR. Modul SBR direncanakan untuk dikembangkan secara *In-House*, dengan berbekal *Source Code* yang tersimpan pada environment BPS. Untuk melanjutkan pengembangan dari konsultan, kegiatan *assessment* SBR dilakukan terhadap FRS Modul SBR dari konsultan, baik *source code* maupun antarmuka sistem yang sudah ada. Selanjutnya dari hasil *assessment* disusun *Functional Requirement (FR)* pengembangan sistem SBR berdasarkan pada *requirement* awal pembangunan FRS khususnya modul Pengelolaan Database Bisnis, serta membuat prioritas terkait pencapaian untuk tahun 2020. Pembahasan FR dilakukan untuk mendapat FR final sebagai sumber revisi pengajuan anggaran konsultan dan pembuatan *backlog* ke depan. Karena waktu yang terbatas pada 2020, maka pembahasan FR juga meliputi mana saja yang merupakan item prioritas. Prioritas ini dimaksudkan khususnya untuk uji coba implementasi petunjuk teknis statistik ekonomi terintegrasi.

Kemajuan pengembangan sistem pada tahun 2020 meliputi penyiapan infrastruktur SBR, perbaikan basis data uji coba sistem, fasilitas untuk mengunduh hasil pencarian dalam bentuk excel dan pdf, peningkatan performa pada sistem, konfigurasi auto deploy, improvisasi halaman web sistem SBR, dan perbaikan fungsi pencarian pada sistem.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Impor data, *cleaning*, dan *matching* data membutuhkan waktu lama
2. Pengembangan sistem SBR belum optimal dikarenakan perubahan struktur basis data yang harus disesuaikan *subject matter* menyebabkan beberapa fitur sistem perlu disesuaikan.
3. Beban dan jadwal pekerjaan yang bersamaan membutuhkan SDM yang fokus dalam pengembangan sistem.
4. Belum mampunya sistem dalam membuat master frame secara otomatis sehingga pengerjaannya kurang efisien.
5. Adanya variabel-variabel kebutuhan Neraca yang belum terakomodasi.
6. Belum mampunya sistem dalam membuat statistik/demografi usaha/perusahaan.
7. Adanya beberapa error dalam fungsi profiling perusahaan.
8. Belum siapnya sistem SBR untuk mengakomodasi data pajak dan sumber lain yang akan masuk ke SBR.

9. Sistem belum dapat digunakan untuk memproses *query* usaha/perusahaan oleh pengguna yang tidak terlalu paham dengan SQL Server
10. Sistem belum dapat digunakan sebagai dasar dalam penghitungan serta pengelolaan beban responden.
11. Sistem belum mampu untuk melakukan pencatatan perubahan data dengan baik.

Strategi yang diambil untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Penyusunan analisis fungsi (*functional requirements*) dan menetapkan prioritas minimal untuk pengembangan Sistem SBR sebagai bagian dari *Frame Register System (FRS)*
2. Membentuk tim kolaborasi statistik terintegrasi meliputi perwakilan/*liaison officer (LO) subject matter*, neraca, dan kedeputan MIS untuk mengidentifikasi variabel yang dibutuhkan untuk dicakup dalam SBR dan membangun standar data/ variabel awal yang ke depan disepakati dan digunakan bersama.
3. Melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan ID SBR dalam proses integrasi dan pemutakhiran data hasil survei *subject matter* ke dalam basis data SBR.
4. Berkoordinasi dengan tim Direktorat Sistem Informasi Statistik untuk mencari solusi guna peningkatan performa sistem SBR, melalui pengembangan sistem yang mendukung SBR
5. Mendokumentasikan dan melakukan evaluasi proses bisnis pemutakhiran *survey feedback* dan data administratif untuk dibangun petunjuk teknis dan tata kelola yang lebih efisien ke depan.

#### 4. Aplikasi Penggantian Sampel KSA berbasis web

Aplikasi Penggantian Sampel KSA berbasis web dibuat dan dikembangkan untuk mempermudah proses penggantian sampel KSA yang umumnya terjadi dalam setiap bulan pengamatan. Kegiatan penggantian sampel KSA yang semula dilakukan secara manual, kini telah dilakukan dalam sistem berbasis web sehingga dapat lebih cepat diproses, dapat di-monitor secara berkala, dan dilakukan sinkronisasi.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Aplikasi masih dikembangkan karena ada perubahan kebutuhan yang dinamis
- Master area frame yang belum di-update sehingga bisa menyebabkan perbedaan master wilayah lama dengan yang baru.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi masalah adalah:

- Pengembangan sistem terus dilakukan sesuai kebutuhan dan dilakukan bertahap.
- Master frame masih tetap menggunakan master yang lama sampai dilakukannya updating frame.

#### 5. Aplikasi Clustering BS2020

Aplikasi Clustering BS adalah aplikasi berbasis web yang dibuat khusus untuk memudahkan pengguna dalam melakukan *clustering* dan *numbering* BS dari SLS/non SLS sehingga menghasilkan peta Blok Sensus. Pada aplikasi ini, pengguna dapat menggunakan menu upload peta SLS/non SLS yang akan di-*clustering*, menggabungkan SLS/non SLS yang berdekatan menjadi satu BS sesuai dengan syarat ketentuan pembentukan BS (*clustering*), memberikan nomor pada BS hasil *clustering* (*numbering*), verifikasi (monitoring), dan pemberian informasi muatan dominan pada BS hasil penomoran.

Masalah/kendala yang terjadi terkait aplikasi adalah:

- Adanya error saat melakukan upload peta pada aplikasi Clustering BS2020 karena adanya *self intersection* pada poligon yang di-*upload*.
- Basemap Google pada aplikasi menyebabkan proses loading semakin lama.
- Belum adanya monitoring progress, akses login khusus petugas mitra, informasi blok sensus yang mengalami keanehan.
- Terdapat perbedaan alur pada aplikasi sehingga daerah yang tidak diakui oleh wilayah manapun tidak bisa diproses pada aplikasi Clustering BS2020.

Strategi dan mitigasi yang dilakukan dalam mengatasi kendala adalah sebagai berikut:

- Perbaikan dilakukan oleh kabupaten/kota dan pada sistem ditambahkan fungsi untuk mengecek ke-valid-an geometri yang diupload.
- Menambahkan fitur menghilangkan basemap pada aplikasi untuk penggunaan kuota internet sehingga proses loading lebih cepat.
- Menambahkan fitur monitoring, fitur login mitra, fitur menampilkan BS yang mengalami keanehan.
- Penambahan fitur untuk pengolahan wilayah yang tidak diakui oleh wilayah manapun.

#### 6. Aplikasi SP2020-IDSLS

Aplikasi SP2020-IDSLS digunakan untuk mengidentifikasi wilayah SLS pada kegiatan Rakor tingkat kecamatan dalam kegiatan SP2020. Dalam aplikasi ini, dapat

dilakukan penambahan perbaikan pada SLS/non SLS pasca Rakor Kecamatan (Rakorcam). Perbaikan atau perubahan yang dapat dilakukan melalui aplikasi ini adalah:

- Perbaikan atau perubahan nama SLS,
- Perubahan untuk menggabungkan SLS, dan
- Penambahan SLS baru.

Masalah atau kendala dalam aplikasi ini adalah:

- Database master SLS yang tidak kompatibel dengan database aplikasi
- Aplikasi lambat karena database yang cukup besar
- Aplikasi tidak dapat digunakan kasus-kasus khusus, misal SLS yang pindah desa.
- Terdapat inkonsistensi pada rekap data untuk SLS yang pindah desa.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala adalah:

- Perlu adanya konversi data agar database master dapat digunakan.
- Untuk performa database yang lebih baik dilakukan indexing pada database
- Fitur ditambahkan pada aplikasi untuk mengatasi kebutuhan yang dinamis atau untuk kasus-kasus khusus.
- Masalah inkonsistensi rekap data, dilakukan penggantian status secara manual pada SLS yang pindah desa.

## 7. Pembuatan sistem pelayanan “Geospatial API”

Sistem pelayanan Geospatial API dibuat untuk menyediakan service data peta BPS berupa API. Dalam sistem ini, disediakan menu pembuatan token API untuk dapat mengakses data geospasial yang dibutuhkan.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Dalam pembuatan token API terdapat rentang waktu secara default
- Data yang bersifat privat dapat dikonsumsi pengguna jika tidak dibatasi penggunaannya.
- Token API yang di-generate tidak bisa digunakan untuk mengambil data dari server geoportal.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Menambahkan pilhan waktu expired token paling lama 3 bulan.
- Menambahkan fitur internal untuk dapat mengakses data privat dan men-generate token setiap 60 menit sekali.
- Mengganti alamat request token API agar bisa digunakan untuk pengambilan data.

## 8. Pembuatan aplikasi Dashboard WebGIS administrator

WebGIS Administrator digunakan untuk melihat statistik dari website WebGIS BPS yang dapat diakses melalui <https://sig.bps.go.id>. Tujuan dibuat aplikasi ini adalah untuk menyajikan kepada publik berbagai informasi yang terkait dengan kerangka wilayah kerja statistik, peta, dan data. Beberapa fitur yang disediakan dari WebGIS Administrator adalah:

- Melihat jumlah unique visitor, visitor by IP, dan total hits pada WebGIS BPS
- Melihat jumlah pengunjung per hari
- Melihat distributor browser yang digunakan user
- Melihat distribusi operating system yang digunakan user
- Melihat asal link kunjungan dari user dan link yang sering dikunjungi user.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Pengguna salah interpretasi dalam memahami informasi pada web
- Data visitor menjadi anomali karena banyak permintaan yang 'unknown'
- Data rekap/laporan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Menambahkan penjelasan mengenai informasi pada tampilan web.
- Menghilangkan visitor yang memiliki informasi 'unknown'
- Membuat fitur untuk men-download laporan sesuai rentang waktu yang dipilih.

## 9. Pengembangan Geospatial System (GS)

Geospatial System dibangun untuk mendukung proses bisnis SBFA (*Statistical Business Framework and Architecture*) yang berkaitan dengan fungsi Geospatial System dan saling terintegrasi dengan sistem lainnya di lingkungan BPS. Di tahun 2020, penyempurnaan sistem telah dilakukan seperti penerapan SSO, modifikasi modul rekap, dsb. Sistem sudah digunakan BPS kabupaten/kota, Provinsi, dan Pusat untuk kegiatan pembentukan Blok Sensus. Adanya GS sangat bermanfaat dalam:

- manajemen data geospasial
- memudahkan dalam mengakses data geospasial baik dalam raw data maupun service API (Application Programming Interface)
- memudahkan dalam memonitor progress dan kualitas data Geospasial yang dikirimkan BPS Kabupaten/Kota
- memudahkan mekanisme approval berjenjang terhadap data Geospasial yang dikirimkan BPS Kabupaten/Kota
- memudahkan sistem lain untuk mengakses data Geospasial dalam bentuk service API.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Kebutuhan GS yang dinamis.
- Kebutuhan storage yang sangat besar.
- Kurangnya SDM dalam pengembangan.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Penambahan fasilitas atau fitur disesuaikan dengan prioritas dan dilakukan secara bertahap.
- Perlu ada diskusi lebih lanjut dengan Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data mengenai storage.
- Adanya penambahan SDM dari SIS (PBD) sebagai tim developer.

#### 10. Pengembangan Aplikasi Wilkerstat berbasis mobile

Aplikasi Wilkerstat merupakan aplikasi berbasis android yang digunakan untuk membantu petugas lapangan dalam mengenali wilayah kerjanya, mengambil titik koordinat (geotagging) dan foto suatu landmark atau infrastruktur, dan dapat juga melakukan monitoring petugas lapangan.

Aplikasi Wilkerstat sudah dibangun sejak 2018. Di tahun 2019, Aplikasi Wilkerstat digunakan untuk kegiatan pemutakhiran peta wilkerstat yang dilaksanakan oleh seksi Integrasi Pengolahan dan iseminasi Statistik (IPDS) kabupaten/kota. Di tahun 2020, Aplikasi Wilkerstat dikembangkan berbasis mobile untuk kegiatan statistik pariwisata yang dilaksanakan oleh seksi Statistik Distribusi, yaitu untuk updating direktori pariwisata, survei hotel tahunan, survei restoran UMB, dan survei usaha makan minum UMK.

Dalam kegiatan survei pariwisata, hasil geotagging lokasi jasa pariwisata yang direkam dengan aplikasi wilkerstat akan memperoleh kode unik ID willkerstat. Kode tersebut harus diinput ke aplikasi web entri bersamaan dengan isian kuesioner. Aplikasi web entri akan mengakses service ke aplikasi wilkerstat untuk memastikan ID wilkerstat tersebut terdaftar.

Aplikasi Wilkerstat juga digunakan untuk proses listing survei restoran (VREST). Selain untuk geotagging, aplikasi digunakan untuk mengisi isian variabel-variabel pertanyaan listing. Namun. Aplikasi Wilkerstat tidak didesain untuk kuesioner elektronik.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Kurangnya pengetahuan atau pemahaman seksi Statistik Distribusi mengenai penggunaan aplikasi wilkerstat terutama terkait pendaftaran user ke aplikasi mengingat pelatihan tidak maksimal (dilakukan secara online).

- Dari segi prosesnya, ID wilkerstat banyak yang tidak ditemukan saat dilakukan proses entri, padahal ID tersebut ditemukan dalam database.
- Oleh karena aplikasi wilkerstat tidak didesain untuk kuesioner elektronik maka tidak ada proses validasi di setiap variabel pertanyaan listing. Sehingga, saat penarikan sampel data dari aplikasi wilkerstat tersebut tidak bisa langsung digunakan.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Untuk mempermudah komunikasi antar dua seksi/bagian, seksi IPDS kabupaten/kota diminta untuk membantu menyelesaikan masalah pendaftaran user.
- Perubahan coding program dilakukan di web entry untuk memasukkan ID wilkerstat.
- Melakukan koreksi dan perapihan secara manual menggunakan Excel sebelum dikirimkan untuk proses pengambilan sampel.

## **2. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2019**

Rata-rata capaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selama tahun 2019 sebesar 103,69%, sedangkan rata-rata tahun 2020 sebesar 131,24%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam hal capaian kinerja. Perbedaan Renstra yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020 juga perlu diperhatikan. Tabel 3.7 menyajikan secara rinci perbandingan capaian kinerja Direktorat PMSS terhadap target Renstra 2019 dan Renstra 2020.

Beberapa indikator kegiatan tahun 2019 sudah tidak ada lagi dalam kegiatan 2020, yaitu jumlah geotagging infrastruktur desa dan jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 yang mutakhir (satuan lingkungan setempat). Indikator kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan Sensus Penduduk 2020. Untuk tahun 2020, pemutakhiran peta wilayah kerja statistik berfokus pada pembentukan master wilayah dan peta blok sensus. Dengan demikian indikator kinerja jumlah laporan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir, jumlah peta desa dan blok sensus yang diupdate, dan jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 yang mutakhir (desa/kelurahan) terdapat pada indikator penunjang pada unit kerja Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik. Ketiga indikator tersebut target dan realisasinya terangkum dalam indikator persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas.

Di sisi lain, pada beberapa tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama terdapat beberapa penyesuaian pada Renstra 2020-2024 dibandingkan Renstra sebelumnya. Sebagai contoh, pada Renstra sebelumnya, terkait dengan desain sampling,



indikator kinerja utamanya adalah jumlah dokumen desain sensus dan survei yang mutakhir. Pada Renstra 2020-2024, indikator kinerja utamanya disesuaikan menjadi persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas. Perbandingan capaian kinerja berdasarkan Renstra 2015-2019 dan Renstra 2020-2024 secara lebih detail disajikan pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Terhadap Target Renstra 2019 dan 2020**

2019 Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Strategis/Indikator 2019 (1)	2020		Satuan (4)	2019		2020		Capaian Kinerja (%)	
	Tujuan/Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)		Target (5)	Realisasi (6)	Target (7)	Realisasi (8)	2019 (9)	2020 (10)
Sasaran strategis: Tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna	Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas								
Jumlah dokumen desain sensus dan survei yang mutakhir	Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Dokumen/ %	45	50	100	100	111,11	100,00
Jumlah dokumen pengembangan kerangka sampel survei yang mutakhir	Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Dokumen	46	53	47	59	115,22	125,53
Jumlah publikasi standardisasi dan klasifikasi statistik yang terbit tepat waktu	Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi/ Laporan	4	4	5	6	100,00	120,00

2019	2020		Satuan	2019		2020		Capaian Kinerja (%)	
	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator 2019	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)	Persen			100	100		100,00
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS			Persen	100	100				
Jumlah laporan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir			Publikasi/Laporan	1	1				
Jumlah peta desa dan blok sensus yang di-update			Dokumen	500	500				
Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 yang mutakhir (desa/kelurahan)			Dokumen	83.706	84.091				
Jumlah geotagging infrastruktur desa			Titik koordinat	2.900.000	2.900.000				
Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 yang mutakhir (satuan lingkungan setempat)			Dokumen	1.200.000	1.312.573				
Persentase data SBR yang ter-update			Persen	100	99,38				
Jumlah sistem aplikasi pengembangan metodologi sensus dan survei yang dikembangkan dan dipelihara			Sistem	6	6				
	Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data								

2019	2020		Satuan	2019		2020		Capaian Kinerja (%)	
Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator 2019	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah permintaan layanan konsultasi klasifikasi oleh kementerian/ lembaga/institusi/ perorangan	Terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei (baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, stral, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik)	Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Dokumen	100	105	100	75	158	210,67

### 3. Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Renstra 2020-2024

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terhadap target Renstra 2020-2024 dihitung berdasarkan realisasi 2020 terhadap target renstra 2020. Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terhadap target Renstra 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 2020 Terhadap Target Renstra 2020-2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Realisasi 2020	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas					
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Persen	100	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Realisasi 2020	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Dokumen	47	59	125,53
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikas/ Laporan	5	6	120,00
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)	Persen	100	100	100
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data					
Terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei (baik dri aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, stral, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik)	Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Kegiatan	75	158	210,67

#### 4. Prestasi

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei pada tahun 2020 diantaranya:

1. Telah dilakukan ujicoba penggunaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kerangka Sampel Area (KSA) yang terintegrasi dengan aplikasi web dan mobile KSA-Pro. KSA Pro merupakan reengineering KSA yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Pusat Statistik. Fungsi yang diujicobakan meliputi pengajuan usulan penggantian sampel, persetujuan usulan penggantian sampel, dan updating Master Area Sampling Frame. Aplikasi ini melibatkan peran dari BPS Kabupaten, BPS Provinsi, dan BPS Pusat dalam melakukan pengelolaan sampel segmen KSA.
2. Program alokasi dan penarikan sampel rumah tangga secara otomatis yang terintegrasi pada dashboard monitoring Survei Pertanian Terintegrasi 2020 (SITASI2020). Inovasi penggunaan program dalam bentuk script R yang tertanam pada aplikasi dashboard

monitoring ini telah memangkas waktu pemrosesan alokasi pan penarikan sampel karena dapat dilakukan real time.

3. Penggunaan Sistem Pengelolaan Kerangka Sampel (*iFrame*) pada beberapa survei bidang produksi antara lain Survei Komoditas strategis Tebu dan Lada 2020 dan Survei Hortikultura Potensi (SHOPI) 2020. Pengajuan survei dan progres persiapan survei mulai dari pengusunan desain sampai dengan pembuatan daftar sampel terdokumentasi dalam sistem sehingga dapat menjadi rujukan informasi bagi pihak-pihak yang terlibat yaitu Subject Matter di BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten.
4. Aplikasi Clustering BS2020 merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat khusus untuk memudahkan pengguna dalam melakukan *clustering* dan *numbering* BS dari SLS/non SLS sehingga menghasilkan peta Blok Sensus.
5. Aplikasi SP2020-IDSLS merupakan aplikasi yang mendukung pemutakhiran data SLS untuk kegiatan SP2020.
6. Aplikasi Wilkerstat sebagai output pengembangan teknologi *Geographical Information System (GIS)* dinilai sebagai inovasi untuk mendapatkan peta yang akurat. Aplikasi Wilkerstat berbasis mobile telah dikembangkan untuk kegiatan survei pariwisata.
7. Penyempurnaan *Geospatial System* telah dilakukan seperti penerapan SSO, modifikasi modul rekap, dsb. Sistem sudah digunakan BPS kabupaten/kota, Provinsi, dan Pusat untuk kegiatan pembentukan Blok Sensus..
8. Geospatial API dan Aplikasi Dashboard WebGIS Administrator merupakan aplikasi berbasis web yang berkaitan dengan pengguna data.
9. Tindak lanjut dari Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPS dengan Kemenkeu untuk perolehan data wajib pajak sebagai sumber pemutakhiran data administratif SBR secara reguler; sudah secara bertahap mengirimkan data yang dibutuhkan oleh SBR serta inisiasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya sebagai bentuk kolaborasi data administratif.
10. Terbitnya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 mengenai KBLI dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis Standar Data Statistik merupakan rujukan kode referensi dan standar data baik di internal BPS maupun di Kementerian dan lembaga lainnya bentuk wujud dari implementasi Prinsip Satu Data Indonesia khususnya prinsip pertama dan prinsip keempat.
11. Peluncuran dan sosialisasi secara live melalui media Zoom dan Youtube BPS terkait Peraturan Badan KBLI 2020 dan pengemasan ulang sistem pencarian klasifikasi statistik berbasis web dan mobile dengan nama baru Sistem Pembakuan Statistik (Sibaku) yang lebih ramah pengguna, dalam rangkaian Hari Statistik Nasional 2020.

12. Penyusunan draft awal Standar Data Statistik dan Petunjuk Teknis Penyiapan Statistik Ekonomi Terintegrasi berkolaborasi lintas unit kerja (kedeputian MIS, *subject matter*, biro hukum/ kerja sama, bina program, dan neraca) sebagai langkah awal proses transisi integrasi statistik dari hulu ke hilir di lingkungan BPS sesuai dengan proses bisnis baru GSBPM dan SBFA.
13. Data SBR pasca Sensus Ekonomi 2016 mulai digunakan sebagai kerangka (*frame*) survei *subject matter* secara bertahap. Kegiatan *updating* direktori Pariwisata dan dilanjutkan Survei Statistik Pariwisata tahun 2020 menggunakan data SBR hasil integrasi dengan *subject matter* Statistik Pariwisata yang hasil pencacahan lapangan dikembalikan ke SBR untuk input pemutakhiran data SBR. Data tersebut juga dipetakan dan dilengkapi dengan kode wilayah kerja statistik dan *geocode* (*latitude* dan *longitude*). Data SBR yang telah diperbarui dipersiapkan untuk kembali digunakan sebagai kerangka survei Statistik Pariwisata pada tahun 2021. Metode ini disebut pemutakhiran *survey feedback* yang akan berjalan secara reguler dan terus akan diperluas dengan survei survei lainnya di Subject matter.
14. Partisipasi aktif tim SBR dalam pembahasan indikator ekonomi digital di tingkat internasional sebagai delegasi BPS dalam Task Team Digitalization dan Globalization pada *UN Committee Expert on Business and Trade Statistics*.

## 5. Kegiatan Prioritas 2020

Kegiatan prioritas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei pada tahun 2020 diantaranya adalah:

1. Pembentukan Blok Sensus 2020,
2. *Capacity Building Bidang Metodologi Sensus dan Survei*,
3. Penyusunan Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan 2020,
4. Penyusunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020,
5. Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dalam Satu Data Indonesia, dan
6. *Post Enumeration Survey* (PES) - SP2020.

## 6. Upaya Efisiensi

Upaya efisiensi yang dilakukan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selama tahun 2020 diantaranya adalah:

1. Dalam rangka mendukung program pemerintah menangani pandemi COVID19, maka dilakukan penghematan pada beberapa pos anggaran antara lain pelaksanaan pelatihan dan workshop secara online. Penyampaian materi melalui video conference sehingga mengurangi biaya akomodasi untuk peserta pelatihan dan workshop.

2. Kegiatan pembentukan BS2020 dilakukan secara integrasi antara kegiatan Sub-direktorat Pengembangan Kerangka Sampel dan Sub-direktorat Pengembangan Pemetaan Statistik tahun 2020. Kegiatan ini dikoordinir oleh 2 unit kerja sehingga efektif dalam pelaksanaan pelatihan, pengolahan, dan monitoringnya sehingga waktu dan biaya menjadi lebih efisien.
3. Pelaksanaan pelatihan BS2020 juga terintegrasi dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidang Metodologi Sensus dan Survei yang mengundang peserta dari BPS Provinsi. Dengan kegiatan ini banyak output yang bisa dihasilkan yaitu sharing knowledge terkait metodologi sensus dan survei mulai dari perancangan metode, penyusunan klasifikasi, penyusunan standarisasi, penyusunan kerangka sampel, dan pengembangan peta statistik.
4. Pengembangan aplikasi wilkerstat berbasis android, aplikasi Clustering BS2020, aplikasi SP2020-IDSLS, sistem layanan Geoportal API, aplikasi Dashboard WebGIS administrator menggunakan *software* tidak berbayar (*open source*). *Developer* aplikasi tersebut berasal dari Direktorat PMSS. Hal ini meniadakan biaya pengadaan *software*.
5. Pengembangan *Frame Register System (FRS)* Modul SBR melanjutkan *source code* pihak ketiga yang belum terselesaikan pada tahun 2019. Pengembangan dilakukan secara *inhouse* kolaborasi pengembang (*developer*) dari Direktorat PMSS dan SIS. Demikian pula pengembangan Sistem Pembakuan Statistik (Sibaku) Online dan Mobile untuk pencarian dan ujicoba pengusulan standar data/ klasifikasi statistik yang juga dikembangkan *inhouse* oleh *developer* Direktorat PMSS.
6. Pengalihan layanan konsultasi klasifikasi statistik berbasis web (online) yang sebelumnya dikelola secara terpisah di Direktorat PMSS melalui sistem SPK Online, menjadi diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) yang dikelola bersama antara Direktorat PMSS dan Direktorat Diseminasi Statistik sehingga lebih efisien dalam komunikasi dan mudah diakses oleh pengguna secara satu pintu.
7. Pelaksanaan pembahasan KBLI 2020 dan penyusunan uji coba Juknis Standar Data Statistik menggunakan media zoom sehingga dapat menghemat pengeluaran anggaran terkait pembiayaan rapat maupun FGD, menyikapi adanya Pandemi Covid 19 sehingga metode diskusi, harmonisasi data KBLI 2020 dan Standar Data merupakan perintah penggunaan teknologi informasi berbasis online sebelum Direktorat lain menggunakannya.
8. Dari sisi sumber daya energi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei berupaya menghemat energi listrik (misal: meminimalisasi lampu pada siang hari, tidak bekerja diluar jam kerja seorang diri di dalam ruang kantor), menghemat prasarana (misal meminimalisasi penggunaan kertas/*paperless*).

## 7. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Pagu anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei menjalankan fungsi pemerintahan dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik selama tahun 2020 adalah sebesar 1,49 milyar rupiah. Realisasi anggaran menurut program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Menurut Program Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020**

No	Program/Kegiatan	Pagu 2020 (Rp)	Realisasi s/d Desember 2020 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</b>				
2900. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei				
1	Pengembangan Desain Sensus dan Survei	46.741.000	45.896.400	98,19
2	Penyusunan Dan Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi Dan Ukuran-Ukuran Statistik	269.353.000	235.286.600	98,08
3	Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS berbasis Web	1.041.616.000	1.040.102.998	99,89
4	Penyusunan Statistical Business Register (SBR)	37.732.000	27.684.027	73,37
5	Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik	92.602.000	86.743.900	93,67
2905. Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan				
6	PES SP2020	412.503.000	358.507.446	86,91
2897. Sistem Pendukung Layanan untuk Diseminasi Data dan Informasi Statistik				
7	Penyusunan Metodologi Sampling Pendataan Keluarga Tahun 2020	142.792.000	108.224.000	75,79
8	Penyusunan Metodologi Sampling Kajian Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2020	73.518.000	66.003.000	89,78
	<b>Jumlah</b>	<b>2.116.857.000</b>	<b>1.968.448.371</b>	<b>92,99</b>

Berdasarkan Tabel 3.9, penyerapan anggaran masing-masing kegiatan pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dapat sebesar 92,99%. Meskipun demikian, pada kegiatan Sistem Pendukung Layanan untuk Diseminasi Data dan Informasi Statistik



(2897), penyerapan anggaran hanya sebesar 75,79%. Hal ini disebabkan adanya adendum/perubahan ruang lingkup perjanjian kerja sama tetapi tidak dilakukan revisi anggaran. Selain itu kuota penerimaan honor pokja bagi Tim Pelaksana kegiatan telah maksimal, sehingga ada pagu yang tidak dapat direalisasikan.

Penggunaan anggaran pada kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Kode:2900) sudah dilakukan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Desain Sensus dan Survei adalah sebesar 98,19 persen dari pagu anggaran kegiatan Pengembangan Desain Sensus dan Survei; Realisasi anggaran kegiatan Penyusunan Dan Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi Dan Ukuran-Ukuran Statistik sebesar 98,08% dari pagu anggaran; realisasi anggaran Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS berbasis Web sebesar 99,89% dari pagu anggaran; realisasi anggaran kegiatan Penyusunan *Statistical Business Register* (SBR) adalah sebesar 73,37% persen dari pagu; realisasi anggaran kegiatan Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik adalah sebesar 93,67% persen dari pagu anggaran. Secara keseluruhan penyerapan anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selama tahun 2020 sebesar 96,48 %.

## 1. Tinjauan Umum

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari Indikator Kinerja Utama sebagai acuan tingkat keberhasilan. Sebagian besar sasaran strategis yang telah ditetapkan mempunyai tingkat pencapaian indikator secara rata-rata sebesar 131,24 persen. Terdapat 3 indikator yang melampaui target yaitu jumlah publikasi standarisasi dan klasifikasi statistik yang terbit tepat waktu (120%) dan jumlah dokumen pengembangan kerangka sampel survei yang mutakhir (125,53%), dan jumlah pembinaan dan/atau kerjasama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei (210,67%).

## 2. Tindak Lanjut

Semakin banyaknya indikator statistik yang diperlukan oleh pengambil kebijakan menjadi tantangan bagi Direktorat PMSS untuk dapat menyusun metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas. Tindak lanjut atas evaluasi kinerja Tahun 2020 adalah:

- 1) Pengayaan SDM terus dilakukan, bisa dengan memanfaatkan media belajar secara *online* atau pun mengikuti forum atau grup statistik di dalam negeri dan internasional.
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait di internal BPS dan peningkatan manajemen/ tata kelola kegiatan dalam pelaksanaan desain sensus dan survei serta pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi, agar keseimbangan antara beban tugas, waktu, dan sumber daya yang tersedia tetap terjaga, dan tujuan tercapai.
- 3) Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal sangat dibutuhkan terutama teknologi *Geographical Information System* (GIS) untuk kegiatan pengembangan kerangka sampel, *updating*, dan pengumpulan data kegiatan sensus dan survei. Pengembangan sistem aplikasi berbasis GIS juga perlu ditingkatkan untuk memudahkan proses pengerjaan peta digital agar lebih efisien, akurat, dan tepat guna.

- 4) Integrasi antar-sistem perlu dilakukan sehingga semua pekerjaan tidak lagi dilakukan secara manual dan konsisten, seperti manajemen data SBR, kerangka sampel, peta wilkerstat, dan lain-lain. Sistem yang terus dikembangkan adalah *Geospatial System* dan yang harus dibuat adalah *Frame Register System*.
- 5) Penerapan tahapan dan proses GSBPM harus dipatuhi dan dikembangkan sesuai dengan teknologi terakhir.
- 6) Peningkatan pelayanan publik satu pintu di bidang metodologi statistik seperti konsultasi desain survei, *Geospatial System*, dan klasifikasi statistik berdasarkan standardisasi manajemen yang modern.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

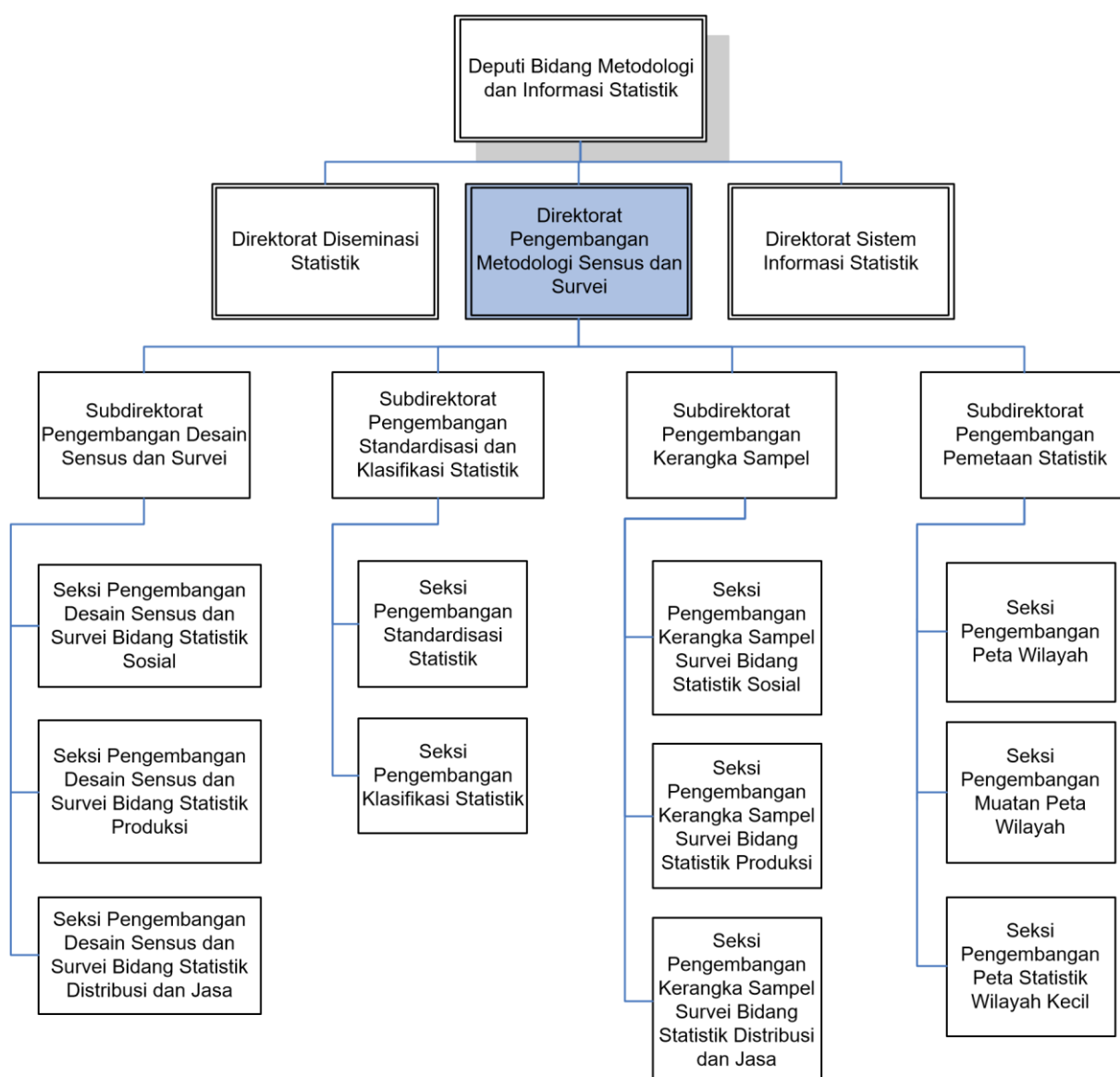
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2008

## STRUKTUR ORGANISASI

### DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI



Lampiran 2. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

Instansi : Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Misi :

1. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI).
2. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Tujuan	Sasaran/Uraian	Indikator	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas</b>	Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Penyediaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk mewujudkan data statistik berkualitas. Penyediaan publikasi Metropolitan Statistical Area (MSA).	Meningkatkan kualitas perencanaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien. Menyediakan publikasi Metropolitan Statistical Area (MSA).
	Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Penyediaan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Meningkatkan kualitas kerangka sampel yang terintegrasi dengan informasi geospasial yang akurat. Meningkatkan penggunaan daftar induk dan kode referensi dalam kegiatan statistik di Indonesia.
	Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Peningkatan penggunaan standar data dan klasifikasi statistik serta kode referensi di Indonesia	Meningkatkan penggunaan standar data, termasuk klasifikasi statistik, yang berkualitas dalam kegiatan statistik di Indonesia

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran/Uraian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
	Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Penyediaan peta wilayah kerja statistik yang akurat	Meningkatkan kualitas kerangka sampel yang terintegrasi dengan informasi geospasial yang akurat
<b>Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data</b>	Terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik),	Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Penyelenggaraan pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik dengan K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei untuk membangun Satu Data Indonesia.</li> <li>- Mengembangkan sistem/aplikasi untuk mendukung penguatan metodologi sensus dan survei di lingkungan Direktorat PMSS guna peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja serta dapat meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan penyelenggara kegiatan statistik;</li> <li>- Meningkatkan sistem kerja melalui kebijakan reward and punishment dalam rangka menciptakan penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;</li> <li>- Meningkatkan koordinasi antar kedeputian, direktorat, dan daerah dalam perencanaan sensus dan survei; dan</li> <li>- Meningkatkan penerapan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).</li> </ul>

Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Sasaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020

**PENGUKURAN KINERJA SASARAN**

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI TAHUN 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian (%)	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Tujuan 1: Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas</b>						
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Persen	100	100	100,00	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Dokumen	47	59	125,53	
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi/Laporan	5	6	120,00	
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)	Persen	100	100	100,00	
<b>Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data</b>						
Terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei (baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, stral, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik)	Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Kegiatan	75	158	210,67	

Lampiran 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan (Kondisi Desember 2020)

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI  
MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN  
(KONDISI DESEMBER 2020)**

No	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Direktur	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Subdit Pengembangan Desain Sensus dan Survei	2	7	9	1	-	-	-	19
3	Subdit Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik	-	6	8	1	2	-	-	17
4	Subdit Pengembangan Kerangka Sampel	-	4	9	1	-	-	-	14
5	Subdit Pengembangan Pemetaan Statistik	-	8	6	-	-	-	-	14
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>65</b>



Lampiran 5. Mailing List Publikasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020

**MAILING LIST PUBLIKASI  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI  
TAHUN 2020**

<b>No</b>	<b>Judul Publikasi</b>	<b>Instansi BPS</b>	<b>Instansi Dalam Negeri</b>	<b>Instansi Luar Negeri</b>	<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>Perpus Nasional/ Daerah</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kumpulan Metodologi Sensus dan Survei 2019 (Bidang Statistik Sosial, Bidang Statistik Produksi, dan Bidang Statistik Distribusi dan Jasa)	70	-	-	-	-	70
2	Publikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020	59	27	-	-	-	86



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp: 021 3841195, 3842508, 3810291 Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: [bpsdq@bps.go.id](mailto:bpsdq@bps.go.id)